



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat Kampus:
Jl. Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari. Baturaja – 32116 OKU Sumsel
Telepon: (0735) 326122 E-mail: fisip_ubr@yahoo.co.id

SURAT TUGAS PENELITIAN
NOMOR: 023/PP/FSP-UBR/III/2015

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yunizir Djakfar, S.Sos., M.I.P
NIDN : 0202067501
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
Alamat Kampus : Jl. Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari Baturaja (32116)
Kabupaten OKU Propinsi Sumatera Selatan Telepon (0735) 326122
E-mail: *fisip_ubr@yahoo.co.id*

Dengan ini menugaskan Tim Penelitian Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Hendra Alfani, S.Sos, M.I.Kom : Ketua Tim
2. Akhmad Rosihan, S.I.Kom., M.Si : Anggota
3. Herwin Sagita Bela, S.I.P. : Anggota
4. Darwadi M. Suwarno, S.I.Kom : Anggota
5. Alip Susilowati Utama, S.I.P. : Anggota

untuk melaksanakan kegiatan **Riset Evaluasi Partisipasi Masyarakat: Money Politic/Vote Buying pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ogan Komering Ulu** kerjasama dengan Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu, dilaksanakan pada:

Waktu Pelaksanaan : Maret – Juli 2015
Lokasi Penelitian : Kabupaten Ogan Komering Ulu

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu sebagai mitra utama pelaksanaan penelitian ini. Atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Baturaja, 03 Maret 2015

Dekan,

Yunizir Djakfar, S.Sos., M.I.P.
NIDN : 02 0206 7501

**RISET EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT:
MONEY POLITICS/VOTE BUYING PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BATURAJA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL RISET EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Judul Riset : Riset Evaluasi Partisipasi Masyarakat: *Money Politic/Vote Buying* pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ogan Komering Ulu
-
2. Pelaksana : Tim Peneliti
Ketua : Hendra Alfani, S.Sos., M.I.Kom
Anggota : Akhmad Rosihan, M.Si
Darmadi M. Suwarno, S.I.Kom
Herwin Sagita Bela, S.I.P
Alip Susilowati Utama, S.I.P
-
3. Mitra Riset : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Komering Ulu
-
4. Biaya Riset :
Dana KPUD : Rp. 10.000.000
(Sepuluh Juta Rupiah)

Baturaja, 27 Agustus 2015

Mengetahui
An. Ketua KPUD OKU,

DIVISI PARMAS DAN SDM,

YUDI RISANDI



Ketua Tim Peneliti


Hendra Alfani, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	4
C. Partisipasi Masyarakat dan Peran Politik Uang (<i>Money Politics</i>)	5
D. Metode Penelitian	9
E. Analisis dan Intepretasi data	
1. Deskripsi Narasumber	16
2. Money Politics/Vote Buying dalam Pemilihan Umum.....	18
F. Kesimpulan dan Saran	31
G. Daftar Pustaka	32
H. Lampiran	

RISET EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT:

***Money Politics/Vote Buying* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014**

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara demokratis, pemilihan umum merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai perwujudan demokrasi. Di dalam *International Commission of Jurist*, Bangkok Tahun 1965, dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*. Selanjutnya juga dirumuskan definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas. Selain itu, pemilihan umum juga dimaksudkan sebagai upaya *rolling* kekuasaan demi menghindari kekuasaan yang absolut yang selama ini melekat pada negara otoriter.

Pemilihan umum merupakan ajang yang dianggap paling ideal dalam memilih perwakilan. Dengan adanya pemilihan umum maka ruang untuk ketidakadilan dalam penentuan perwakilan semakin dipersempit. Pemilihan umum sendiri bisa dilihat dari banyak sisi. Dari sisi sistem, aktor, tahapan, manajemen, pembiayaan, etika, penegakan hukum dan lain-lain. Semua menunjukkan, bahwa pemilihan umum adalah masalah teknis, bagaimana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Namun dalam melihat persoalan pemilihan umum, tidak boleh terjebak pada masalah teknis semata. Bagaimanapun pemilihan umum sesungguhnya adalah instrumen demokrasi. Sebagai alat demokrasi, pemilihan

umumberusaha mendekati obsesi demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Keadaan mutlak tersebut memaksa negara-negara transisi seperti Indonesia untuk mempersiapkan semua yang dirasa menjadi kebutuhan dasar bagi terselenggaranya pemilihan umum. Seperti kesiapan sistem pemilihan umum yang diberlakukan, kesiapan lembaga penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kesiapan peserta pemilihan umum dan tata cara penyeleksian peserta, serta yang terpenting adalah kesiapan masyarakat atau pemilih.

Dalam kurun waktu 70 tahun kemerdekaan, Indonesia telah melaksanakan 9 kali pemilihan umum. Dalam 9 pelaksanaan pemilihan umum tersebut terdapat beberapa catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Catatan penting itu terkait dengan sistem pemilihan yang diterapkan, kesiapan bagi organisasi pelaksana, transparansi pelaksanaan dan perilaku pemilih yang berubah-ubah menjadikan pelaksanaan pemilihan umum akan meninggalkan banyak masalah.

Dari semua cacatan penting pelaksanaan pemilihan umum yang terjadi di Indonesia, perilaku pemilih menjadi satu sorotan utama karena posisinya sebagai penentu keberhasilan pemilihan umum yang demokratis. Oleh karena itu, banyak riset ditujukan untuk meneliti perubahan-perubahan sosial di masyarakat sebagai pemilih.

Perilaku pemilih sangat menentukan bagaimana model pemilihan umum akan dijalankan. Hal ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan umum. Dapat dikatakan bahwa dengan pemilihan umum yang transparan tentu akan menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas menjadi rumit manakala dalam pemilihan umum suara terbanyak akan menentukan jumlah kursi yang didapat oleh suatu partai. Jumlah kursi tersebut akan sangat menguntungkan bagi pergerakan partai di pemerintahan. Fenomena suara terbanyak ini yang

menggiring beberapa calon legislatif melakukan *vote buying* atau politik uang sebagai upaya untuk meraih suara terbanyak tersebut.

Pada intinya istilah politik uang menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, entah itu dalam pemilihan umum ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Dalam pengertian seperti ini, uang merupakan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Tentu saja dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain, tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.

Selain itu, istilah politik uang juga dapat dipakai untuk menunjuk pada pemanfaatan keputusan politik tertentu untuk mendapatkan uang. Artinya ialah kalangan tertentu yang memiliki akses pada keputusan politik dapat memanfaatkan keputusan tersebut untuk mendapatkan uang.

Relasi kuat antara politik dan uang (*money politics*) dipengaruhi oleh, dan mempengaruhi, hubungan antara pihak politisi, keanggotaan partai dan para pemilih. Timbulnya masalah uang bagi demokrasi karena banyaknya kegiatan politik demokratis yang tidak bisa dilaksanakan tanpa uang. Dalam hal ini, politik uang cenderung diartikan secara sempit karena hanya berfokus pada dana kampanye dan partai politik. Padahal, banyak pihak pelaku luar yang terlibat dalam persaingan politik dengan tujuan membentuk agenda kebijakan publik, mempengaruhi undang-undang atau debat pemilihan umum dan keberhasilannya.

Dalam pandangan James Kerr Pollock sebagaimana dikutip oleh Edi Nasution dalam tulisannya bertajuk Perselingkuhan Antara Politik dan Uang (*Money Politics*) Mencederai Sistem Demokrasi, dikatakan bahwa relasi antara uang dan politik akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. Menurutnya, kehidupan politik yang sehat mustahil diwujudkan, selagi uang secara tanpa batas terus berbicara dalam kehidupan politik. Harus diakui, bahwa peran uang memang semakin vital dalam demokrasi modern, antara lain digunakan dalam pembiayaan iklan, proses seleksi kandidat,

penyelenggaraan survey, dan juga mobilisasi pemilih selama kampanye. Namun, peran uang juga dikhawatirkan kian membahayakan proses demokrasi ketika setiap partai politik dan kandidat terus berlomba-lomba menumpuk uang dengan berbagai cara untuk membiayai proses pemenangannya. Dengan beragamnya sumber uang haram (*dirty money*), sehingga praktik pencucian uang (*money laundering*), dan politik uang (*money politics*) memungkinkan dilakukan oleh partai politik dan kandidat dalam memenangkan pemilihan umum. Dan hal ini telah mengubur cita-cita luhur sistem demokrasi. Karena itulah reformasi pengaturan atas peran uang atau donasi politik menjadi agenda penting dalam upaya menyelamatkan sistem demokrasi.

Dalam suatu pemilihan umum legislatif ataupun pilkada, apabila ada dugaan telah terjadi praktik politik uang maka hal yang sulit dilakukan ialah membuktikan sumber atau penyebab terjadinya praktik politik uang tersebut. Demikian sulitnya dibuktikan sehingga tidak jarang dialami suatu kondisi di mana penanganan dugaan kasus politik uang menjadi tidak terarah. Padahal keterpilihan seseorang dalam jabatan publik dengan cara-cara yang melanggar hukum (ketentuan peraturan perundangan-undangan) yang berlaku, tentu saja berimplikasi buruk pada saat ia menjalankan kekuasaannya. Di situlah nantinya terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang akan melahirkan bibit-bibit korupsi dan jika itu dibiarkan terus berlangsung akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam riset evaluasi Pemilihan Legislatif tahun 2014 diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

- a. Mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilihan umum.
- b. Bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilihan umum dan setelahnya.

2. Tujuan Khusus:

- a. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilihan umum.
- b. Terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilihan umum.

C. Partisipasi Masyarakat dan Peran Politik Uang (*money politics*)

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya

Di dalam pemilihan umum, baik problem struktural maupun problem cultural berkumpul membentuk perilaku politisi dan perilaku pemilih. Pertautan

kedua perilaku inilah yang kemudian membentuk representasi politik yang lebih terkesan penyerahan mandat yang bersifat transaktif dan banyak dipengaruhi oleh uang. Politik transaktif di dalam pemilihan umum inilah yang kemudian disebutkan sebagai politik uang.

Praktek politik uang dalam pemilihan umum sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya korupsi dalam berbagai sendi kehidupan dalam suatu negara bangsa. Jika dirunut dari sejarahnya, korupsi sendiri telah berlangsung sangat lama. Syed Hussain Alatas menyatakan bahwa sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul.

Politik uang membuat proses politik menjadi bias, akibat penggunaan uang, pemilihan umum sulit untuk mencapai tujuan sejatinya. Seperti ditulis oleh Klitgaardada semacam benang merah kausatif antara praktik korupsi (politik uang) di satu sisi dengan perkembangan politik di masa depan. Korupsi terkadang merupakan sarana untuk tujuan-tujuan politik. Tetapi korupsi juga dapat menuntut biaya politik yang besar. Korupsi dapat menjadi sebuah mekanisme untuk membeli kesetiaan politik yang kadang menjurus pada semacam integrasi dan partisipasi. Sebaliknya, apabila dampaknya kian luas, korupsi dapat mengakibatkan keterasingan masyarakat serta ketidakstabilan politik.

Dalam konteks di Indonesia istilah pasangan serasi dalam percaturan politik di negeri ini adalah politik dan uang, istilah yang sama digunakan oleh Edi Nasution dengan tambahan perselingkuhan politik dan uang. Ungkapan itu kiranya cukup menggambarkan pemilihan umum Legislatif 2014. Jajak pendapat mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih kuat dijalankan calon anggota legislatif. Dua dari tiga responden menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum lalu sangat diwarnai praktik politik uang.

Pengalaman publik dalam menjalani pemilihan umum membuktikan bahwa satu dari lima responden menyatakan pernah ditawari uang atau barang untuk memilih caleg ataupun partai politik tertentu dalam Pemilihan Umum

Legislatif 2014. Demikian pula terkait informasi apakah mereka pernah mendengar adanya pembagian uang atau barang di sekitar rumah tinggal, 2 dari 5 responden menyatakan pernah mendengar adanya pembagian uang pada pemilihan umum lalu.

Keyakinan masyarakat makin diperkuat pernyataan responden yang menyebut caleg atau partai politik cenderung memberikan keuntungan materi secara langsung agar terpilih. Lebih dari separuh responden menyatakan, calon wakil rakyat memberikan keuntungan materi kepada pemilih ketimbang menawarkan program. Di wilayah tertentu bahkan ada yang menganggap politik uang sebagai rezeki musiman yang sayang ditolak.

Diyakini, salah satu faktor yang memengaruhi politik uang marak adalah caleg selalu memakai politik uang untuk memobilisasi pemilih. Praktik itu sendiri sebenarnya sudah lama diketahui masyarakat. Namun, mereka sulit mencegahnya. Implikasinya bisa sistemis karena caleg yang mengeluarkan modal besar dan berhasil duduk di parlemen tentu akan berjuang mengembalikan modal tersebut. Hal itu mengakibatkan publik pesimistis terhadap kualitas kinerja anggota legislatif.

Realitas berkembangnya politik uang dari pemilihan umum ke pemilihan umum semakin memberi keyakinan kepada kita bahwa praktek politik uang dalam masyarakat sudah begitu mendarah daging baik pada masyarakat bawah maupun masyarakat elit. Kalau di masyarakat bawah politik uang lebih transparan dan tidak sensitif sementara pada kalangan elit lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitif. Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat kian permisif dengan praktek politik uang dalam pemilihan umum. Praktik politik uang menjamur karena iklim yang kondusif. Hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan caleg/parpol. Prinsipnya, ambil uang ataubarangnya, urusan pilihan tergantung di bilik suara.

Dampak dari politik uang yang pelan-pelan menghilangkan esensi demokrasi tentu harus dicari formula yang paling tepat untuk menghilangkannya.

Dari sisi aturan, dalam pasal 82 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pemilih, tetapi tidak menyertakan penjelasan rinci mengenai tim kampanye yang dimaksudkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam peraturan yang diterbitkan pemerintah.

Dalam membicarakan konstruksi hukum penanggulangan politik uang dalam pemilihan umum, sejak awal harus disadari bahwa hukum menyimpan kelemahan. Kelemahan dalam sistem hukum diantaranya adalah; (1) Peraturan Perundang-undangan dirumuskan lebih dari satu orang; (2) Peraturan perundang-undangan merupakan produk dari proses dan lembaga politik yang sarat dengan kepentingan; (3) Keterbatasan Bahasa yang mengemas gagasan keadilan peraturan perundang-undangan; (4) Pelaksanaan Hukum & Integritas Penegak Hukum yang lemah; dan (5) Kesadaran Hukum Masyarakat untuk tunduk dan melakukan pengawasan.

Pembuatan suatu aturan hukum tentu memiliki tujuan tertentu. Terkait dengan politik uang, ada politik hukum untuk melarang sejumlah praktek keuangan kampanye tertentu sebagai perbuatan terlarang dan mengancamnya dengan sanksi baik pidana maupun administratif. Di antara tujuan mengatur kampanye pemilu tentu untuk memberi kesempatan yang adil bagi semua kontestan pemilihan umum meraih dukungan rakyat pemilih serta untuk menghindarkan kampanye dari kekacauan, kerusakan, penghinaan, dan sebagainya. Khusus menyangkut uang maka akan terkait dua hal: (1) pengaturan dana kampanye (baik sumbernya, jumlahnya, pengeluarannya) dan; (2) larangan menyuap para pemilih.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan pemilu sudah mengatur tentang berbagai kualifikasi perbuatan politik uang, akan tetapi sangat sedikit pelaku tindak pidana politik uang yang dikenakan sanksi. Hal ini bermuara pada 3 (tiga) persoalan mendasar, yakni: *pertama*, Peraturan perundang-undangan pemilu itu sendiri, dimana masih terdapat kebingungan

mengenaibatasan politik uang terutama dalam membedakannya dengan penggunaan uang terutama untuk aktivitas politik. Di samping itu pengenaan sanksi tidak dapat dilakukan karena aturan sanksi hanya dikenakan kepada kandidat atau tim sukses, sementara yang melakukan praktek politik uang adalah tim bayangan yang tidak di daftarkan ke KPU/KPUD, dan berbagai kelemahan substantif lainnya.

Kedua, integritas penegak hukum. Aparat penegak hukum banyak yang terjangkit penyakit "kronis KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme). Di tangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) kedudukan hukum terkontaminasi dan komoditi profesional yang seharusnya mengabdikan kepada kepentingan dan pelayanan publik kepada "komoditi bisnis". Dampak dari gejala ini tumbuh gejala anti profesional dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi frustrasi dan tidak percaya lagi kepada hukum dan pengadilan.

Ketiga, sikap permisif masyarakat terhadap praktek politik uang dan kurangnya peran serta masyarakat untuk memantau kasus-kasus tindak pidana politik uang dan tindak pidana pemilu lainnya setelah tahapan pemilu selesai. Pemantauan terhadap perjalanan kasus-kasus pemilu bahkan tidak lagi dilakukan oleh mereka yang melaporkan ke panitia pengawas dan/atau polisi.

D. Metodologi Penelitian

Metode riset yang dipilih adalah kualitatif, di mana pada metode penelitian ini dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah bentuk pendekatan interpretif di mana peneliti membuat sebuah interpretasi dari apa yang dilihat, didengar, dan dipahami, serta interpretasi peneliti tidak bisa dipisahkan dari latar belakang, sejarah, konteks, dan pemahaman sebelumnya (Creswell, 2009:176). Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan suatu cara untuk penggalian dan pemahaman makna individu atau kelompok yang berasal dari

suatu permasalahan manusia dan sosial, di mana proses penelitiannya terkait dengan pemunculan pertanyaan dan prosedur, data yang di peroleh dari suatu keadaan partisipan tertentu, membangun analisis data secara induktif dari tema-tema yang khusus menuju sesuatu yang bersifat umum, dan peneliti membuat interpretasi makna yang berasal dari data yang diperoleh (Creswell, 2009:4).

Ditambahkan oleh Creswell bahwa dalam pendekatan kualitatif, peneliti memeriksa sebuah isu yang berhubungan tindakan individu, dengan cara mengumpulkan cerita-cerita dari individu dengan menggunakan sebuah pendekatan naratif di mana seorang individu diwawancarai pada masa tertentu guna mengetahui pengalaman sebenarnya individu (2009:18). Metode kualitatif (*qualitative method*) mengharuskan para peneliti menganalisis topik kajiannya melalui alat bantu pemahaman seperti cerita, mitos, dan tema. Alat-alat ini membantu para peneliti untuk memahami bagaimana orang memaknai pengalamannya, karena metode kuantitatif tidak tergantung pada analisis statistik untuk mendukung sebuah interpretasi tetapi lebih mengarahkan para peneliti untuk membuat sebuah pernyataan retorik atau argument yang masuk akal mengenai temuannya (West & Turner, 2008:77).

Dengan metode kualitatif yang digunakan, selanjutnya peneliti memilih studi kasus (*case study*) sebagai *strategy of inquiry* (yaitu suatu model yang menyediakan suatu arah yang jelas bagi prosedur penelitian), karena studi kasus merupakan salah satu *strategy of inquiry* dalam metode kualitatif (Creswell, 2009:12-13); (Neuman, 2006:41). Peneliti memilih untuk menggunakan studi kasus sebagai *strategy of inquiry* dikarenakan permasalahan penelitian mengenai Peran *Money Politics/Vote Buying* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan sebuah kasus yang seringkali ditemui dalam interaksi sehari-hari dalam proses pemilihan dan mempunyai proses cerita tersendiri serta terdapat batasan waktu dalam proses penelitian ini. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Creswell (2009:13), bahwa studi kasus merupakan strategi penyelidikan di mana peneliti menggali atau memeriksa secara mendalam sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu orang

atau lebih, di mana kasus yang dipelajari dibatasi oleh waktu dan aktivitas serta peneliti mengumpulkan informasi secara detail yang menggunakan sejumlah prosedur pengumpulan data berdasarkan periode waktu tertentu.

Studi kasus sebagai suatu strategi pendekatan metode kualitatif terbagi menjadi dua yaitu *single case study* dan *collective* atau *multiple case study*. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menggunakan *single case study* karena melalui jenis ini menawarkan kesempatan untuk memperoleh suatu penjelasan yang mendalam (walaupun hanya sebatas kasus dan tempat yang diteliti) mengenai satu kasus tertentu dari sebuah fenomena sosial budaya, seperti yang dikatakan oleh Daymon dan Holloway (2002:107), bahwa ketertarikan penelitian pada jumlah kecil yang diteliti dapat dilakukan secara mendalam pada satu waktu tertentu atau pada periode yang lebih lama. Sedangkan kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Dalam pemilihan metode penelitian kuantitatif di atas maka terdapat beberapa yang harus di perhatikan:

1. Sumber data

a) Data Primer

Dalam suatu bentuk penelitian kualitatif yang lebih menekankan relevansi pada topik (Flick, 1998:48) dan perolehan informasi yang kaya mengenai mengenai suatu kasus tertentu (West & Turner, 2008:75), maka penelitian jenis ini lebih menggunakan *nonprobability* atau *nonrandom samples*, yaitu peneliti tidak menentukan suatu ukuran sample tertentu di mana penelitian akan dilakukan (Neuman, 2006:220). Karena menurut Creswell (2009:178) ide dibalik penelitian kualitatif adalah pemilihan partisipan (informan) atau dokumen/visual dengan maksud tertentu yang paling membantu peneliti dalam memahami masalah dan pertanyaan penelitian.

Terkait pemilihan informan dalam penelitian ini, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait langsung dengan proses pemilihan umum legislatif di tingkat kabupaten. Informan penelitian ini terdiri dari ketua partai politik, calon legislatif terpilih, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum.

Peneliti tidak menentukan berapa jumlah informan yang diperlukan, karena ketika terdapat penentuan mengenai jumlah informan atau ukuran sample di awal penelitian ini maka hal tersebut akan menghambat proses peneliti dalam memahami permasalahan secara mendalam dan perolehan informasi yang kaya. Sejalan dengan acuan *nonprobability* atau *nonrandom samples* dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan menggunakan jenis *purposive* atau *judgmental sampling* (Neuman, 2006:220), yang biasanya digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian yang bersifat penyelidikan (*exploratory*) di mana peneliti menggunakan berbagai metode yang dimungkinkan dapat menjangkau sesuatu yang sukar untuk didapatkan (Neuman, 2006:222), dalam arti peneliti dapat menentukan siapa saja informan sepanjang informan tersebut mempunyai informasi yang melimpah dan mendalam terkait permasalahan penelitian ini, dan juga sepanjang informan tersebut memiliki kriteria yang telah disebutkan di atas.

Selain menggunakan jenis *purposive sampling* dalam memilih informan, peneliti juga menggunakan jenis *snowball sampling* (Neuman, 2006:220), yang juga biasa disebut *network sampling*, di mana dalam jenis ini peneliti memulai dengan satu atau beberapa informan dan kemudian melebar atas dasar terkait dengan kasus awal (Neuman, 2006:223). Maksudnya, pada awalnya peneliti memilih satu informan kemudian karena hasil yang didapatkan dinilai kurang memuaskan, peneliti dapat meminta informan tersebut menunjuk seseorang lainnya yang dinilai dapat memberikan informasi yang berlimpah, demikian

seterusnya, dengan mengikuti analogi bola saju yang awalnya kecil akan tetapi menjadi besar seiring bola itu menggelinding di tumpukan salju.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tambahan seperti buku, foto, dokumentasi, dan data yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

2. Pengumpulan data

Secara umum, para peneliti interpretif lebih memilih bekerja dengan data yang tidak bersifat angka yaitu dapat berupa kata-kata atau gambar-gambar visual, yang bertujuan untuk menyajikan pemahaman sekaya dan sedetil mungkin. Dengan kata lain, tradisi interpretif biasanya disebut sebagai membangkitkan ingatan (*evocativeness*), di mana peneliti interpretif berusaha untuk menggambarkan suatu gambaran verbal sekaya mungkin sehingga pembaca merasa sebagai orang yang telah *walked mile in the shoes of group members* (Baxter & Babbie, 2004:62). Dalam pengumpulan datanya, metode kualitatif diantaranya melakukan observasi partisipan, interview secara kualitatif, dan analisis teks secara kualitatif, di mana kunci dari paradigma kualitatif adalah pemaknaan, aturan-aturan, adanya sebuah fokus ideografi, dan penggunaan data kualitatif (Baxter & Babbie, 2004:59). Sebagaimana yang juga dikatakan Patton (2002:4) bahwa dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumen tertulis.

Baxter dan Babbie (2004:325) selanjutnya menjelaskan secara terperinci bagaimana yang dimaksud dengan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu sebuah interaksi antara orang yang mewawancarai (*interviewer*) dan seorang partisipan di mana seorang

interviewer mempunyai sebuah tujuan umum pendekatan, akan tetapi bukan suatu kumpulan pertanyaan spesifik yang harus ditanyakan dengan menggunakan kata-kata dalam sebuah perintah khusus. Sedangkan menurut Patton (2002:4), menyebutkan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif menekankan pada "*open-ended question and probes yield in-depth responses about people's experiences, perceptions, opinions, feelings and knowledge*", dalam arti seorang yang mewawancarai diharapkan dapat melihat tidak saja apa yang dikatakan oleh informan akan tetapi juga peka terhadap perasaan, pengalaman dan pendapat dari informan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya mengajukan pertanyaan yang lebih tidak terstruktur atau semi terstruktur (Baxter & Babbie, 2004:325).

Selain melakukan wawancara mendalam, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan data-data yang bersifat tertulis, foto maupun data visual (Patton, 2002:4); (Baxter & Babbie, 2004:59), sebagai data tambahan atau penguat dalam menggambarkan permasalahan penelitian yang sekiranya tidak bisa diwakili dengan data verbal. Secara singkat, pada metode kualitatif pengumpulan data dapat melalui participant observation, *in depth interview*, dokumentasi, maupun teknik triangulasi.

3. Analisis/Intepretasi data

Suatu data kualitatif biasanya berupa teks, kata-kata tertulis, ungkapan, atau mendeskripsikan simbol, tindakan, kejadian dalam dalam kehidupan sosial (Neuman, 2006:457), sehingga memerlukan proses analisis data. Suatu analisis data menurut Neuman (2000:426) berarti sebuah usaha untuk mencari pola dalam data yang telah terkumpul. Sehingga ketika suatu pola telah teridentifikasi kemudian barulah data tersebut dapat diintepretasikan. Oleh karenanya, terdapat suatu pergerakan pada peneliti kualitatif yaitu dengan bergerak dari sebuah

deskripsi yang berdasarkan pada keadaan sosial tertentu menuju pada suatu interpretasi umum dari makna.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan mulai dari penelitian ini dilakukan sampai setelah memperoleh data dari lapangan secara keseluruhan. Tahapan tersebut yaitu: Analisis data dalam penelitian ini menurut Miles dan Hebernas (1992 dalam Bungin, 2001:29), terdapat tiga tahap analisis data yaitu:

1. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang ada di lapangan, yang terlebih dahulu terkumpul, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai *money politic/vote buying* pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selanjutnya data yang terpilih akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema. Memadukan data yang tersebar, menelusuri tema, untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data terpilih menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Dalam penyusunan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Artinya, peneliti akan menyajikan dalam bentuk cerita, misalnya peneliti akan menjabarkan bagaimana *money politic/vote buying* itu terjadi dan pola seperti apa yang serta dampaknya terhadap masyarakat. Data tersebut akan di ringkas dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti oleh semua pihak.

3. Tahap Kesimpulan

Analisis penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran disetiap makna yang muncul dari data mengenai

bagaimana *money politic/vote buying* itu terjadi, pola yang digunakan dan dampaknya di masyarakat. Setiap data yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan kembali dengan data-data yang didapat.

E. Analisis dan Interpretasi Data

1. Deskripsi Narasumber

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ogan Kemering Ulu dan tepatnya di Kota Baturaja yang dimulai dari Juni 2015. Sumber data dari data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan teknik purposive terhadap 10 orang narasumber kunci yang dilakukan secara intensif. Adapun kesepuluh orang tersebut adalah M. Zam-zam, Hambali, Iskandar Azis, Hendri Wijaya, Erlina, Indrawati Syarial, Eko Sungkono Patra, Zaplin Ipani, Yopi Syahrudin dan Ratika Juwita Sari.

Wawancara dengan Indrawati Syarial atau sering di sapa Iin dilakukan pada hari senin tanggal 22 juni 2015 pukul 20.00 WIB di kediamannya Jl. Moh. Hatta. Indrawati Syarial sekarang menjabat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat di Kabupaten OKU sekaligus menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sudah terpilih untuk priode kedua kalinya menjadi anggota legislatif daerah Kabupaten OKU. Wawancara dengan Hambali dilakukan pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015 pukul 16.00 bertempat di Masjid Muhammadiyah Kompoeng Kauman Baturaja. Hambali merupakan tokoh agama dari organisasi Muhammadiyah yang sudah berpengalaman dalam mengurus organisasi maupun jamaah masjid. Berikutnya Hendri Wijaya merupakan tokoh pemuda yang sekarang menjadi Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Wawancara dengan Hendri Wijaya dilakukan pada hari jumat tanggal 26 juni 2015 pukul 19.00 bertempat di kediamannya Jl. Pahlawan Kemarung

Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur. Wawancara dengan Erlina dilakukan pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2015 pukul 13.00 WIB bertempat di kediamannya di kelurahan Sukaraya. Erlina merupakan narasumber dari calon legislatif terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wawancara dengan narasumber dari ketua partai politik dilakukan juga dengan Eko Sungkono Patra. Politisi muda ini sekarang menjabat sebagai Ketua DPD PKS OKU dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD priode 2014-2019. Wawancara dilakukan pada hari minggu tanggal 28 Juni 2015 pukul 11.00 WIB bertempat di kediamannya di Kelurahan Kemalaraja.

Wawancara dengan M. Zam-zam dilakukan pada hari senin 29 Juni 2015 di tempat berkerjanya di desa Batu Kuning. M. Zam-zam merupakan tokoh agama dari organisasi Nahdatul Ulama (NU) yang juga mantan Anggota DPRD OKU. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Iskandar Azis merupakan tokoh agama yang sekarang ini menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupten OKU dan menjabat sebagai sekretaris. Wawancara dengan Iskandar dilakukan pada hari selasa 30 juni 2015 pukul 14.00 bertempat di sekretariat MUI di Kompleks Masjid Islamic Center Baturaja.

Wawancara dengan narasumber dari anggota legislatif dilakukan kembali kepada anggota dari Fraksi Golkar yaitu Zaplin Ipani. Zaplin merupakan kader Partai Golkar yang berangkat dari bawah sehingga dapat menjadi anggota legislatif yang sekarang sudah terpilih untuk kedua kalinya priode 2014-2019. Wawancara dengan Zaplin dilakukan pada hari jumat 10 Juli 2015 pukul 15.00 WIB bertempat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU. Narasumber dari anggota DPRD yang diwawancarai juga adalah Yopi Syahrudin dari Fraksi Partai Demokrat. Wawancara dilakukan pada hari jumat tanggal 10 juli 2015 puluk 09.00 WIB bertempat di Kantor DPRD OKU.

Wawancara dengan Ratika Juwita Sari dilakukan pada hari minggu 12 Juli 2015. Ratika Juwita Sari merupakan mahasiswa S2 Jurusan Magister Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya. Meski baru berumur 23 tahun, Ratika Juwita Sari mempunyai peran besar sebagai entrepreneur muda yang mampu bersaing dengan entrepreneur terdahulunya. Dengan basis pendidikan S1 berasal dari Ilmu Pemerintahan tentu memudahkan beliau dalam mengamati fenomena politik uang di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. *Money politics/Vote buying* dalam Pemilihan Umum

a) Terjadinya *Money politics/Vote buying* di Masyarakat

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mejunjung tinggi azas-azas demokratis dengan selalu mengedepankan aspirasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dan kemajuan bangsa. Akan tetapi di sisi lain, sistem demokratis juga membawa tantangan bagi keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia. Salah satu cara Negara memfasilitasi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia dengan melakukan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Pemilihan umum juga merupakan konsekuensi logis dari demokrasi sistem perwakilan yang sekarang ini dianut oleh banyak negara-negara modern. Dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat lembaga yang dibentuk guna memaksimalkan pelaksanaan pemilihan umum, lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU berfungsi sebagai lembaga yang mengatur jalannya berbagai pemilihan umum mulai dari Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati telah bekerja sebagaimana mestinya dengan selalu menjalankan tugas dan wewenang, serta mengacu pada setiap undang-undang yang ada.

Sebagai konsekuensi logis dari demokrasi, pemilihan umum akan jadi ajang seleksi yang objektif dalam memilih majelis perwakilan. Pemilihan

umum akan mengakomodir suara rakyat yang tersebar menjadi satu dan terkondisi pada beberapa orang. Dengan pemilihan umum, suara mayoritas akan menentukan dan hal ini merupakan terjemahan dari konsensus nasional yang artinya keseluruhan dari suara mayoritas dan minoritas menyetujui untuk memilih satu wakil.

Dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil segala bentuk kecurangan tentu akan mengurangi makna dari pemilihan umum tersebut. Kecurangan yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah politik uang atau *vote buying*. *Money politics* yang terjadi dalam setiap pemilihan umum, dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Tidak hanya pada masyarakat perkotaan, masyarakat desa pun mempunyai perspektif yang sama.

Aktivitas politik uang dalam berbagai pemilihan umum khususnya dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten OKU dibenarkan oleh beberapa kalangan, diantaranya seperti yang tergambarkan dari hasil wawancara dengan Eko Sungkono Patra di bawah ini:

"Memang ada mas demikian bahwa, kita tidak memungkiri ya bukan hanya di Baturaja tapi di seluruh daerah. Money politics itu benar ada, saya pun merasakan. Dan inilah yang salah satu yang tidak disukai oleh PKS. Kenapa saya, apa namanya tidak begitu antusias, tidak begitu antusias kemudian ikut di apa namanya, Pemilu. Karena cost politiknya sangat tinggi."

Dalam pandangan Eko Sungkono, politik uang memang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari cost politik itu sendiri. Disadari atau tidak, uang menjadi satu-satunya alat dalam meraih suara dalam pemilihan umum. Akan tetapi, dengan fenomena politik uang, nilai demokrasi yang akan dibangun tentu tidak akan terwujud.

"Iya memang pada kenyataannya seperti itu sekarang ini, politik uang dijadikan salah satu ikhtiar bagi kandidat. Sulit untuk mendapatkan suara kalau tidak dengan cara yang demikian. Tetapi hal itu sebenarnya bukan hal yang baik untuk dilaksanakan. Hal itu adalah pelemahan dalam demokrasi, walaupun sebenarnya demokrasi itu sendiri sulit untuk tidak diwarnai oleh money politic itu."

Politik uang yang terjadi pada setiap pemilihan umum nyatanya tidak mampu dihindari. Hal ini terjadi tidak terlepas dari anggapan sebagian masyarakat bahwa politik uang adalah hal yang wajar dilakukan calon sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat.

"Jadi pada intinya, politik tanpa bicara cost itu bohong. Namun kembali ke masyarakat. Tidak semua masyarakat seperti itu. Karena masih banyak masyarakat kita yang objektif dalam menghadapi pemilihan."

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di atas dapat dianalisis bahwa perilaku politik uang memang seringkali terjadi setiap aktivitas pemilihan umum di berbagai daerah. Politik uang (*Money politics/Vote buying*) dianggap oleh sebagian besar para politisi dapat meningkatkan perolehan suara dari masyarakat bagi calon-calon yang maju dalam pemilihan umum. Proses demokrasi yang seharusnya menjadi efektif dan efisien menjadi sesuatu aktivitas yang sangat mahal dan kompleks.

Sebenarnya dalam perjalanan pemilihan umum di Indonesia terjadi pergeseran yang signifikan menuju proses demokrasi dalam konteks etika dalam berpolitik, seperti yang di sebutkan oleh salah satu narasumber di bawah ini:

"Sebenarnya perilaku politik itu mengikuti mereka. Saya contohnya pada pemilu legislatif 1999 dan 2004 ndak ada itu, saya mengalami. Pengurus partai saja akan malu kalau datang kerumah kita. Jadi yang kita tunjuk-tunjuk semacam pengurus partai itu akan malu kalau kita datang. Itu tahun 1999., 2004 juga masih tidak ada politik uang itu. Nah setelah itu kemudian jadi dak benar."

Dari hasil wawancara di atas tergambar bahwa terjadi perubahan dalam proses pemilihan legislatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana etika politik antara politisi dan masyarakat sangat menjaga etika dalam menjalankan proses demokrasi. Menurut wawancara tersebut, setelah tahun 2004 praktik politik uang di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai ada di masyarakat dan akhirnya menyebar sampai sekarang. Praktik politik

uang di masyarakat ini dianggap oleh beberapa kalangan sangat mempengaruhi perolehan suara bagi seorang politisi yang ikut berkompetisi dalam pemilihan legislatif, seperti kutipan wawancara di bawah ini:

"Menurut bapak, apakah setiap tindakan politik uang yang dilakukan oleh politisi akan mempengaruhi jumlah suara yang didapat? Kelihatan jelas.Mempengaruhi."

Praktik politik uang di masyarakat ternyata telah diyakini oleh sebagian besar masyarakat bahwa praktik tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan calon pemimpin atau wakil mereka. Akan tetapi, banyak yang tidak sadar bahwa praktik tersebut mempunyai dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi kemajuan masyarakat itu sendiri, seperti kutipan wawancara di bawah ini:

"dampak negatifnya itu apabila si calon sudah dipilih melalui politik uang, nanti aspirasinya kadang tidak disampaikan. Kedua, mungkin timbul rasa tidak keikhlasan ini tadi. Harapan calon kasihke uang 5 juta yang dia keluarkan terus dia dapat 50 juta nah itu kan menjadikan hubungan emosional antar calon dan masyarakat terburuk. Sehingga tidak akrab dengan masyarakat. Agek bakal timbul omongan yang tidak benar misalnya "ah sudahlah, suaraku kau tuh aku beli". Nah apalagi dia datang di tempat-tempat warga kesusahan sebagai bentuk kepedulian. Tapi kalau segi positifnya, pertamanya adonyo dia terpilih, dia bisa menjadikan daerah pembinaan untuk selanjutnya, karena bukan untuk satu periode saja, nah periode kedepan misalnya. Itu segi positifnya."

Dari kutipan wawancara di atas terlihat bahwa dampak dari praktik politik uang sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak menyadari bahwa merekalah yang akhirnya mendapatkan dampak dari praktik tersebut, dengan terabaikannya aspirasi dan suara mereka. Proses demokrasi dalam suatu pemilihan umum hanya menjadi praktik jual beli suara yang sangat mencederai proses demokrasi itu sendiri.

b) Pola *Money politics/Vote buying* dalam Masyarakat

Pada dasarnya politik uang diartikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Jadi apapun yang diberikan dan dijanjikan untuk diberikan asalkan orang tersebut mau menuruti keinginan dari yang memberi adalah termasuk dalam kategori politik uang (*money politics*). Akan tetapi hal ini tidak sependapat dengan sebagian orang yang ingin menjadi peserta pemilihan legislatif, sebagaimana dapat kita lihat dari kutipan wawancara berikut ini.

"Apalagi yang keluaranya lebih dan itu bukan money politic ya. Itu koko politic. Politik dengan menggunakan baju koko. Tapi kalau, kan beda orang dengan kasih 100 ribu tiap orang. Balik ke PKS, kita tidak menyarankan untuk hal itu. Dan dengan hadiah seperti ini tadi ini kan termasuk juga ya baju kaos, baju koko itu termasuk juga tapi bukan dalam bentuk uang. Tapi dalam bentuk barang."

Politik uang oleh sebagian orang lebih diartikan dengan pemberian sejumlah uang kepada pemilih, kalau pemberian dalam bentuk lain maka sifatnya bukan politik uang. Hal yang sama juga dinyatakan oleh narasumber lain yaitu sebagai berikut:

"Politik uang juga kalau saya mengartikan kita memberikan uang pada saat pemilihan itu politik uang. Tapi politik uang itu berbeda dengan pembinaan. Menurut saya politik uang dan pembinaan itu berbeda. Kalau saya lebih mementingkan pembinaan."

Politik uang yang oleh sebagian masyarakat diasumsikan terlalu singkat hanya sebatas pemberian uang tunai di saat pemilihan saja, sementara pemberian dalam bentuk barang lain itu tidak termasuk dalam bentuk politik uang. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber di atas bahwa pembinaan tidak termasuk politik uang, akan tetapi pembinaan disini masih terlalu luas maknanya. Kalau berdasarkan pengertian politik uang

yang di jelaskan di atas, maka pembinaan yang masih menggunakan uang masih tergolong dalam bentuk *money politics*.

Berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh narasumber berikut ini,

"Kalau menurut Ibu, selamo pemberian itu diberikan tidak pada saat kampanye itu bukan politik uang. Jadi kan ado waktu-waktunya. Misalno dalam kurun waktu satu tahun selamo nak nyalon sudah bangun masjid, ngasih sembako dan lain-lain kalau menurut ibu itu bukan politik uang. Mungkin be sedekah. Tapi kalau terjadi pembagian uang pada saat hari H kampanye itu sudah pasti politik uang. Tapi kalau sebelum hari H kampanye itu bukan politik kalau menurut Ibu."

Dari apa yang disampaikan oleh narasumber di atas memang benar bahwa yang namanya politik uang atau *money politics/vote buying* adalah proses pemberian dalam masa kampanye. Kalau kegiatan pemberian tersebut bukan dalam masa kampanye bukanlah politik uang yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi sedekah. Walaupun demikian sedekah yang dilakukan oleh orang yang punya niat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif tersebut motivasinya adalah agar orang yang diberi dapat memilihnya karena apa yang sudah diberikannya. Melihat dari kasus ini, esensi dari pemberian itu yang akan kita lihat. Kalau niatnya sedekah maka harus karena tuhan, akan tetapi kalau niatnya supaya dipilih maka itu sama saja dengan menyogok.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, peserta pemilu dalam hal ini orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau yang akan mencalonkan diri mempunyai cara sendiri-sendiri untuk menarik hati pemilih. Termasuk di dalamnya harus mengeluarkan uang yang banyak agar orang atau masyarakat mau memilihnya. Akan tetapi mereka terus bersaing dan mempunyai pola tersendiri agar usaha yang dilakukannya tidak tergolong kedalam *money politics* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ada yang menggunakan cara pemberian dalam bentuk barang dan sembako, ada juga yang mengistilahkannya dengan pembinaan, bahkan ada juga yang melakukan pemberian barang,

pemberian uang, dan pembuatan bangunan seperti jalan, jembatan dan masjid sebelum pemilihan berlangsung atau sebelum ditetapkannya masa kampanye.

Pola-pola politik uang yang telah dijelaskan di atas hampir sama di setiap daerah di Indonesia, hal ini sebagaimana telah dinyatakan oleh narasumber berikut ini,

"Sebenarnya hampir sama. Di daerah satu dengan daerah lainnya dan sifatnya hampir sama. Namun terkait dengan tadi, meski terdapat kesamaan, tidak semua masyarakat di daerah itu yang seperti itu atau ada masyarakat tertentu yang memanfaatkan baik itu pemilu, pilkada maupun pilgub dan pilpres. Jadi memang tidak mungkin tidak ada. Namun sekali lagi kalau kita ini menilai secara objektif tidak ada yang tidak menghiraukan masalah politik uang."

Walaupun hampir di daerah pola yang di terapkan hampir sama akan tetapi tidak semua masyarakat tergiur dengan pemberian calon legislatif tersebut, masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan momen pemilu dan pileg untuk mendapatkan keuntungan sekejap tersebut.

Walaupun sebagian masyarakat masih sering memanfaatkan momen pileg untuk mendapatkan uang, akan tetapi mereka dalam menentukan pilihan masih tergantung dengan faktor lain seperti kenal dan kedekatan terhadap calon tersebut, hal ini dinyatakan oleh narasumber berikut,

"Iyo, perbedaan karakteristik sudah pasti ada. Karena kalau untuk pileg, rato-rato wong yang nak pileg ini, wong yang baru nak di politik. Geraknyo kesini. Datang ke A ngasih, ke B ngasih. Akhirnyo yang nerimo bingung. Kemudian, dimano dio kenal, dimano dio dekat itu yang jadi pilihan terakhir."

Diungkapkan juga oleh narasumber di atas bahwa yang menyebabkan banyaknya politik uang tersebut karena pemilihan legislatif tersebut didominasi oleh orang yang baru aktif berpolitik, jadi gerakannya cenderung menhalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan bahkan dengan cara kotor seperti datangi langsung pemilih untuk memberikan sejumlah uang yang ahirnya menyebabkan pemilih bingung karena yang memberikan uang tersebut terlalu banyak, dan ahirnya

keputusan memilihnya didasarkan oleh faktor lain yaitu kedekatan secara emosional dan seberapa jauh masyarakat mengenal calon tersebut. Tindakan pemberian uang tersebut akhirnya menjadi hal yang sia-sia. Dalam hal ini apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa tindakan pemberian uang langsung dengan cara mendatangi rumah-rumah masyarakat disaat waktu pemilihan sudah dekat adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang baru berpolitik. Kalau orang yang sudah lama, artinya dia sudah memahami karakteristik pemilih dan sudah paham dengan pola yang akan digunakan maka calon tersebut akan melakukan pengenalan diri dulu kepada pemilih pada jauh hari sebelum waktu pemilihan.

Hal itu pada dasarnya sangat baik untuk dilaksanakan, asalkan proses pengenalan tersebut tidak dengan memberikan sumbangan-sumbangan juga, seperti yang dijelaskan oleh narasumber berikut,

"Dalam aturan pilkada itu ndak boleh ada mahar politik. ya tanya aja partai-partai yang ada walaupun bukan bersifat mahar, sumbangan itu sumbangan ini. tapi intinya kalau kita dengar-dengar barangkali lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi gimana seperti itu. Kalau partainya bagus, aturannya bagus. Tapi pelaksanaannya bagaimana, manusianya di dalam partai itu."

Semuanya tergantung dari orang yang menjalankannya, atau tergantung dari calon itu sendiri, apakah dia akan menggunakan cara yang baik atau dengan cara yang kotor. Untuk usaha yang tergolong *money politics/vote buying* jelas sangat banyak sekali yang dapat dilakukan, akan tetapi tergantung dari individunya apakah dia akan menggunakan politik uang atau tidak.

Pola pembelian suara, sangat beragam sekali, ada yang dengan cara memberika uang langsung, berupa sembako, barang, pembangunan jalan, jembatan, masjid, atau uang pembinaan seperti memberikan sumbangan untuk turnamen, atau kegiatan lainnya.

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Money politics/VoteBuying* di masyarakat

Pemilihan umum selain sebagai perwujudan nilai demokratis juga merupakan mekanisme konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokratis dapat terlaksana jika mekanisme dan institusi demokrasi seperti Pemilihan umum merupakan satu-satunya mekanisme. Di Indonesia yang memiliki akar kebudayaan yang sangat oligarkis, praktek konsolidasi demokratis dapat berubah. Pemilu memang suatu keharusan akan tetapi tidak cukup untuk membangun demokrasi yang solid. Kultus individu dan pengaruh elit tradisional serta dorongan dari beberapa oknum yang mencari rente ekonomi di balik proses politik adalah masalah di belakang kesuksesan pemilihan umum. Kondisi ini tetap berjalan dan menjadi salah satu faktor berpengaruh di dalam proses demokratisasi di Indonesia. Praktek beli suara (*vote buying*) adalah faktor penentu di balik mobilisasi massa pemilih pada saat pemilihan umum.

Dari beberapa narasumber yang diwawancarai mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya politik uang bisa dari dua arah. Pertama faktor yang muncul dari masyarakat dan yang kedua muncul dari calon yang diusung oleh partai. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh narasumber berikut ini:

"Sesungguhnya ini karena ada dua mata angin yang saling menguntungkanlah. Satu sisi mereka ingin mengambil keuntungan yang si calon. Kemudian masyarakat ingin mengambil keuntungan. Sama-sama klop lah. Simbiosis mutualisme. Saya merasakan begitu. Dan saya meyakini orang-orang yang duduk di DPR saat ini adalah orang yang keluar uang minimal 500 juta ke atas bahkan 1 milyar."

Politik uang menjadi sangat kuat mengakar di masyarakat karena tercipta ruang yang bebas bagi munculnya transaksi politik yang dilegalkan ditengah-tengah masyarakat. Antara masyarakat dan calon terdapat hubungan yang saling menguntungkan akan tetapi bersifat sementara. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan istilah

perselingkuhan uang dan politik. Karena esensi dari politik adalah memberikan manfaat dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Hubungan simbiosis mutualisme yang dikatakan di atas tidak sepenuhnya disetujui oleh sebagian orang. Hal ini terlihat dari petikan wawancara berikut ini:

"Yang namanya masyarakat itu menurut, pada dasarnya menurut. Jadi kalau tidak diberi kesempatan apa yang mau diambil oleh masyarakat. Jadi kalau kita semata-mata menyalahkan masyarakat tidak bisa. Yang jelas kan pelaku politik itu yang menyebabkan perilaku masyarakat seperti itu. Kalau Bupati misalnya, kalau semua calon Bupati tidak mau melakukan money politik ya mau dapat apa masyarakat. Tapi karena calon Bupati itu sendiri mau melakukan itu bahkan terjadi persaingan ya akhirnya masyarakat pun begitu. Termasuk juga legislatif, kalau semua calon legislatif tidak mau melakukan itu ya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa."

Kesalahan utama terletak pada calon yang dengan terang-terangan memberikan peluang bagi masyarakat merasa tergantung dengan pola-pola penyebaran politik uang sebagai upaya untuk memperoleh suara terbanyak. Apabila calon tidak melakukan politik uang tentu masyarakat tidak akan terperangkap dalam kondisi yang seakan-akan dikondisikan sedemikian rupa hingga muncul ketergantungan. Kondisi masyarakat yang memungkinkan tersebut dapat berupa kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh narasumber berikut ini:

"Mungkin, pola pikir kito ini beda-beda, mungkin ini mempengaruhi. Kedua faktor ekonomi dek ye dan faktor kecerdasan. Ini pasti menentukan sikap sekelompok orang itu. Faktor-faktor itu mungkin yang membuat mereka jadi nak minta duit."

Faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang salah satunya adalah faktor ekonomi. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan mudah dipengaruhi keputusannya dengan memberikan bantuan-bantuan yang mereka butuhkan seperti kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Selain faktor ekonomi, faktor kecerdasan juga

mempengaruhi munculnya politik uang. Faktor ekonomi lemah ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang sampai saat ini belum menyentuh masyarakat ekonomi rendah.

"Karena banyak masyarakat pemilih itu masih dalam keadaan ekonomi lemah, dalam islam sendiri keadaan ekonomi lemah itu menggoyahkan iman. Sehingga orang-orang yang lemah itu imannya goyah. Sedangkan memakmurkan rakyat itu adalah perintah undang-undang, jadi kalau masyarakatnya masih lemah dan belum makmur ya wakil rakyat itu belum menjalankan undang-undang."

Akan tetapi, kondisi ekonomi tidak serta merta menjadikan masyarakat dapat dipengaruhi dengan diberikan bantuan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sembako dan lain sebagainya.

"Mungkin dari daerah satu kedaerah lain pasti ada perbedaan. Pasti. Dilihat dari sosial culture daerah setempat. Adonian yang punya keluarga besar terus sudah merakyat pasti dak dibutuhke lagi sejenis politik uang itu karena memang sudah terkenal di daerah itu. Lain kalo memang dio dak punya keluarga besar samo memang sebelumnya idak merakyat biasonyo pake caro-caro macam politik uang itu."

Dari banyak kasus politik uang yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang dapat dipengaruhi hanya dengan sejumlah uang yang nominal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini dimanfaatkan oleh calon untuk berkompetisi dalam hal besaran nominal uang yang akan diberikan. Besaran nominal tersebut menjadi penentu bagi besaran perolehan suara calon tersebut. Untuk mampu bersaing dengan besaran nominal tersebut tentunya partai politik harus mencari calon yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan masyarakat dan tentu mempunyai sumber finansial yang mendukung agar mampu bersaing dengan partai lain yang mengusung calon lebih baik dari segi kemampuan dan materi.

"Oleh karena itu, partai juga menampilkan, terjadi persaingan dari sisi materi tadi menampilkan orang-orang yang dianggap mampu dalam hal dibidang materi untuk bersaing dengan calon-calon dari partai yang lain."

Balek kelingkaran setan, samo gilonyo dunio ini.karena terjadi persaingan tadi, money politik tadi. Kalau kita menampilkan orang-orang yang bersih yang ndak mau money politik, yo dak dapat kursilah.Akhirnya partai jadi ambruk, ancur tenggelam."

Hal yang sama dikatakan oleh Yopi, salah satu narasumber yang saat ini duduk di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menurut beliau, ada sebuah lingkaran yang menjerat antara calon dan rakyat. Rakyat menginginkan uang dan calon membutuhkan suara. Lingkaran ini tidak akan terputus selama ekonomi masyarakat masih rendah dan kesadaran politik juga masih rendah.

"Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita tidak sama dengan kawan kita akan ditinggal.Padahal orientasi kita ingin terpilih.Jadi yang namanya politik uang tadi sudah bisa dikatakan ikhtiar, yang ini yang payah.Sebenarnya bukan kita, tapi kondisi masyarakat yang menginginkan. Jadi susah untuk mencari yang hitam, calon atau masyarakat. Sama juga misalnya calon yang ini menggunakan, yang ini tidak, tapi nanti yang lain melakukan.Artinya kecurangan itu memang sudah melingkar."

Politik uang yang dilakukan oleh calon pada kenyataannya tidak selalu berpengaruh pada peroleh suara. Hal ini terjadi karena besaran nominal mampu mempengaruhi pilihan seseorang. Selain besaran nominal, pendekatan yang dilakukan oleh calon juga mempengaruhi perolehan suara. Meskipun besaran nominal menjadi acuan, akan tetapi kedekatan personal tetap menjadi prioritas dalam memilih calon. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh narasumber berikut ini:

"Inikah pengalaman yang terjadi. Misalkan saudara memberikan 10 ribu tapi mereka tidak kenal, sementara saya juga memberikan 10 ribu dan mereka kenal saya maka akan tetep kembali kepada saya. Begitupun sebaliknya tapi masih ada lain hal yang mempengaruhi pilihan itu. Cuma saya mempercayai bahwa masyarakat tidak akan mungkin memilih calon yang tidak mereka kenal."

Pengalaman seperti di atas menjadi catatan bagi calon-calon lain sehingga membangun koneksi melalui pendidikan dan sosialisasi politik

yang dilakukan langsung di masyarakat. Akan tetapi hal ini tetap tidak menjadi politik uang menjadi hilang sama sekali.

"Iya, makanya di dapil saya itu menolak adanya politik uang, karena itu tidak baik. Menurut saya itu memberikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat. Tapi sebagai seorang politisi kadang-kadang saya terpengaruh dengan yang lain. Ini menyulitkan."

Untuk mengatasi persoalan politik uang, beberapa narasumber mengatakan bahwa peraturan yang tegas mampu mencegah terjadinya politik uang. Peningkatan ekonomi masyarakat juga mempunyai peran penting dalam menghambat politik uang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh M. Zam-zam sebagai tokoh NU berikut ini:

"Hanya dua kalau menurut saya. Satu, aturan yang tegas. Jadi pelaksanaan dari aturan itu yang tegas. Jadi kalau memang aturan itu dilaksanakan dengan tegas saya kira kan ini akan mengikat perilaku dan tidak akan melakukan politik uang. Yang kedua, ekonomi masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu ekonomi sudah memadai, saya kira mereka nggak hirau lagi dengan uang dengan segala macam. Dan barangkali ya pendidikan, pendidikan yang memadai."

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Pemilihan umum merupakan satu hal yang penting dalam negara demokratis. terjadinya politik uang yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi masyarakat dan faktor keinginan calon untuk memperoleh suara terbanyak. Hal ini bermuara pada suatu kondisi berupa simbiosis mutualisme antar masyarakat dan calon tersebut. Lingkaran ini tidak akan terlepas selama pendidikan dan sosialisasi politik tidak dilakukan dengan baik oleh partai politik.
- b) Indikasi politik uang dapat dilihat dari pola yang digunakan. Uang dan politik akan menjadi permasalahan saat dilakukan menjelang pemilihan umum dan sebagai upaya untuk mendapatkan suara.
- c) Politik uang yang terjadi di Kabupaten OKU diakui kebenarannya oleh masyarakat. Politik uang yang dimaksudkan dapat berupa bantuan-

bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako, bantuan pembangunan jalan hingga bantuan masjid yang diberikan kepada masyarakat menjelang pemilihan umum.

2. Saran

- a) Dalam mengatasi politik uang, diperlukan kekuatan yang solid antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar tercipta sinkronisasi antar undang-undang dan pelaksana serta kelompok sasaran. Undang-undang yang ketat tetap tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa pelaksana yang solid.
- b) Selain undang-undang yang ketat dan pelaksana yang tegas, ukuran sanksi bagi pelanggar juga harus dipertegas mengingat pola politik uang yang dilakukan berbeda pada setiap daerah pemilihan.
- c) Partai politik sebagai dasar rekrutmen calon harus lebih mengedepankan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat dan melakukan pembinaan masyarakat sehingga secara perlahan mampu menghilangkan politik uang.

G. Daftar Pustaka

BUKU

- Baxter, A. L., & Babbie, E. 2004. *The Basic of Communication Research*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Bungin, Burhan. 2001. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, W. John. 2009. *Research Desain: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd edition. USA: SAGE Publication.
- Daymon, C., & Holloway, I. 2002. *Qualitative Research Methods in PR and Marketing Communications*. London: Routledge.
- Flick, U. 1998. *An Introduction to Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (6thed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Patton, M. Q. 2002. *Qualitative research and evaluation methods* (3rded.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- West, R. & Turner, H., L. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, 3rd ed. Penerjemah: Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika.

JURNAL

Junal Konstitusi, Vol. II. No. 1 Juni 2009

Hasil Riset ICW, Korupsi Pemilu di Indonesia, 2010

INTERNET

- <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/28/1458036/Noda.Politik.Uang.di.Pemilihan.umum>
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140406_icw_ka_mpanye_fasilitas_negara
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53563f475f480/kasus-pidana-pemilihan.umum-di-polri-didominasi-politik-uang>

H. Lampiran

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Erlina Bachtiar

P : Pewawancara

N : Narasumber

		TRANSKRIP	KET
P	:	Apa tanggapan Ibu terkait dengan politik uang yang pada saat ini oleh sebagian orang dianggap menjadi suatu kewajiban?	
N	:	(menggunakan bahasa Ogan dan bahasa Indonesia) kalau menurut Ibu dek ye, kalau dari kacomato ibu memang dilarang dek ye, idak boleh, lah ado larangannyo. Apabila kita memberikan sesuatu kepada pemilih paling tidak sudah ado peraturan baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang melarang dak boleh adonyo politik uang Tapi kadangkala bagaimana dikemas oleh si calon ini kan kito dak tahu dio bermain duit dibelakang itu. Tapi sejauh kito memandang kito dak tahu dak biso katokan sudah melakukan politik uang kecuali sudah tertangkap tangan. Pokoknyo bagi ibu dilarang. Dilarang keras.	
P	:	Kalaupun ada dalam bentuk kemasan yang berbeda tadi, seperti apa gambaran kemasan itu menurut Ibu?	
N	:	Ado macem-macem bentuk sih dek. Misalnya dalam upaya sosialisasi lewat baliho, stiker dan lain-lain. Nah itu kan wajar-wajar be sebagai bentuk sosialisasi si calon. Dan itu kan dibeli semua, merluke dana pulok untuk beli barang-barang itu tadi. Jadi sah-sah saja kalau memang duit tadi digunakan untuk beli baliho untuk sosialisasi	
P	:	Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi suatu daerah tertentu terjadi politik uang, dibeberapa tempat/daerah?	
N	:	Mungkin, apo namonyo (sambil berfikir) pola pikir kito ini beda-beda, mungkin ini mempengaruhi. Kedua faktor ekonomi dek ye dan faktor kecerdasan. Ini pasti menentukan sikap sekelompok orang itu. Faktor-faktor itu mungkin yang membuat mereka jadi nak minta duit	
P	:	Terkait dengan kemasan tadi bu, menurut Ibu setiap daerah punya kemasan berbeda tidak, misalnya untuk daerah satu menggunakan pola pembagian uang, sementara yang satunya menggunakan pembagian sembako dan lain sebagainya?	
N	:	Tanggapan ibu, Mungkin dari daerah satu kedaerah lain pasti ada perbedaan. Pasti. Dilihat dari sosial culture daerah setempat. Ado nian yang punyo keluarga besak terus sudah merakyat pasti dak dibutuhke lagi sejenis politik uang itu kareno memang sudah terkenal di daerah itu. Lain kalo memang dio dak punyo keluarga besak samo memang sebelumnya idak merakyat biasonyo pake caro-caro macam politik uang itu.	

<p>P :</p> <p>N :</p>	<p>Menurut ibu apakah jumlah uang yang dilakukan dalam upaya memperoleh suara akan selalu sebanding dengan jumlah suara yang didapat?</p> <p>Nah itu belum bisa ditentukan dek, belum biso ditentukan. Belum biso diukur kalau kito ngelepaske sekian itu dapet sekian blm biso diukur. Kareno ratorato untuk di OKU ini sudah cerdas galo, kadang duit itu dimbeknyo be dipilihnyo idak. Itu tergantung culture tempat calon itu tinggal samo keluarga besarnya itu. Makonyo relasi samo keluarga besar ini yang menentukan. Makonyo dengan pemilihan secara langsung ini teraso nian kalau relasi, jaringan samo keluarga besar ini melok menentukan nian. Contohnya ibu ini, ibu banyak keluarga. Dari budak kecil sampe yang sudah tuo begitu jingok baliho ibu langsung dateng dewek. Mangkonyo kito percayo be lah dengan keluarga besak itu. Apolagi ibu sebagai guru. Ibu yakin anak murid ibu pasti milih ibu galo. Jadi ukuran politik uang itu belum pacak menentuke.</p>	
<p>P :</p> <p>N :</p>	<p>Menurut Ibu, apa dampak negatif dan positif dari adanya politik uang?</p> <p>Ibu jugo belum lamo berkecimpung di politik ini dek, jadi belum biso ibu ukur dampak dari politik uang ini misalnya dari dibeli suaronyo itu tadi terus aspirasi masyarakat disampaikan apo idak belum biso diukur. Tapi kalau menurut ibu, dampak negatifnyo itu apabila si calon sudah dipilih melalui politik uang, nanti aspirasinya kadang idak disampaikan. Kedua, mungkin timbul raso tidak keihklasan ni tadi. Harapan calon ngasihke uang 5 juta yang dio keluarkan terus nak dapet 50 juta nah itu kan menjadikan hubungan emosional antar calon dan masyarakat terbentur. Sehingga idak akrab dengan masyarakat. Agek bakal timbul omongan yang dak bener misalnya “ah sudahlah, suaro kau tu lah aku beli”. Nah apolagi nak datang di tempat-tempat wong kesusahan sebagai bentuk kepedulian. Tapi kalau segi positifnyo, pertamonyo adonyo dio terpilih, dio biso menjadikan daerah pembinaan untuk selanjutnyo, karena bukan untuk satu periode be, nak periode kedepan misalnya. Itu segi positifnyo.</p>	
<p>P :</p> <p>N :</p>	<p>Apakah politik uang merupakan bentuk dari pencideraan terhadap etika politik?</p> <p>Kalau biso dihilangkan politik uang itu perlahan-lahan kareno menciderai. Jadi mulai dibinalah hubungan yang baik itu dengan masyarakat di daerah atau tempat-tempat nak jadi dapil kito itu dek. Dibinalah sedini mungkin. Hubungan baik jugo harus tetep dijago, idak nak cumo nak pas nyalon be. Jadi pelan-pelan dihilangkan. Insyallah mungkin. Tanamkanlah sedini mungkin. Kalau biso itu agek pas dikasih mereka bakal ngomong “apodio ini?” tapi kan mustahil. Siapa yang dak galak duit?. Tapi bagi ibu itu tetep menciderai sitra politik. Tapi biasonyo dari calonnyo itulah. Ado yang lah abis banyak tapi tetep be dak tepilih.</p>	
<p>P :</p> <p>N :</p>	<p>Menurut Ibu, apakah pemberian yang diberikan oleh calon kepada calon pemilih misalnya dalam bentuk bantuan sembako, pembangunan masjid dan lain sebagainya termasuk dalam kategori politik uang bukan?</p> <p>Kalau menurut Ibu, selamo pemberian itu diberikan tidak pada saat kampanye itu bukan politik uang. Jadi kan ado waktu-waktunyo. Misalnya dalam kurun waktu satu tahun selamo nak nyalon sudah bangun masjid, ngasih sembako</p>	

		dan lain-lain kalau menurut ibu itu bukan politik uang. Mungkin be sedekah. Tapi kalau terjadi pembagian uang pada saat hari H kampanye itu sudah pasti politik uang. Tapi kalau sebelum hari H kampanye itu bukan politik kalau menurut Ibu.	
P	:	Apakah ada aturan dari partai untuk para kader terkait dengan politik uang?	
N	:	Ado galo aturannyo tentang larangan politik uang itu dek, yang disosialisasikan pada saat pengkaderan.	
P	:	Sanksi seperti apa yang diberikan oleh partai terhadap kadernya atau calon dari partai yang terindikasi melakukan politik uang?	
N	:	Mungkin sanksinya didiskualifikasi kalau ketahuan. Dan ini juga disampaikan pada waktu pendadaran calon.	
P	:	Apa ada aturan dari partai terkait dengan besaran bantuan yang boleh diberikan oleh calon kepada calon pemilih, berapa persen?	
N	:	Mungkin 30%. Ada aturannya memang yang mengatur besaran itu. Tapi yang paling penting itu cak PKS ini kan melakukan sosialisasinya lewat door to door. Minta restu nian samo masyarakat. Pamit minta pamit minta do'a untuk nak nyalon	
P	:	Harapan ibu kedepan apa yang harus dimiliki oleh calon agar politik uang bisa dihindarkan?	
N	:	Tanamkanlah berbuat baik di daerah di calon. Sedini mungkin di bina daerah itu. bangun kerjasama dan jaringan di daerah.	
P	:	Untuk kedepan, misalnya untuk calon yang sudah terpilih dan mau maju kembali, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari perilaku politik uang?	
N	:	Pastinyo pembinaan d daerah dapil kito itu dek, biar mereka cerdas dan idak gampang keno rayuan politik uang.	

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: M. Zam-zam

P : Pewawancara

N : Narasumber

		TRANSKRIP	KET
P	:	Apa tanggapan Bapak terkait dengan politik uang yang pada saat ini oleh sebagian orang dianggap menjadi suatu kewajaran?	
N	:	Sebenarnya tidak ada istilah wajar dalam hal politik uang, karena ini merupakan pencideraan politik. Jadi politik itu jadi kotor. Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada saat pemilukada maupun legislatif. Melukai politik itu sendiri dan menyebabkan politik menjadi kotor.	
P	:	Menurut Bapak apakah politisi yang melakukan politik uang akan melakukan tindakan korupsi apabila sudah terpilih nanti. Ada implikasi kesitu nggak pak?	
N	:	Ya kalau sudah diawali dengan hal-hal yang tidak baik, yang kita khawatirkan akibatnya tidak baik. Hasil dari produk politik tidak baik tentu hasilnya tidak baik.	
P	:	Sepengetahuan bapak, yang selama ini juga aktif mengamati masyarakat, apakah kemudian perilaku masyarakat ini mendorong munculnya politik uang	
N	:	oleh seorang calon politik? Yang namanya masyarakat itu menurut, pada dasarnya menurut. Jadi kalau tidak diberi kesempatan apa yang mau diambil oleh masyarakat. Jadi kalau kita semata-mata menyalahkan masyarakat tidak bisa. Yang jelas kan pelaku politik itu yang menyebabkan perilaku masyarakat seperti itu. Kalau Bupati misalnya, kalau semua calon Bupati tidak mau melakukan money politik ya mau dapat apa masyarakat. Tapi karena calon Bupati itu sendiri mau melakukan itu bahkan terjadi persaingan ya akhirnya masyarakat pun begitu. Termasuk juga legislatif, kalau semua calon legislatif tidak mau melakukan itu ya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya perilaku politik itu mengikuti mereka. Saya contohnya pada pemilu legislatif 1999 dan 2004 ndak ada itu, saya mengalami. Pengurus partai saja akan malu kalau datang kerumah kita. Jadi yang kita tunjuk-tunjuk semacam pengurus partai itu akan malu kalau kita datang. Itu tahun 1999., 2004 juga masih tidak ada politik uang itu. Nah setelah itu kemudian jadi dak benar.	
P	:	Mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa di satu daerah tertentu terjadi politik uang, dan di satu daerah lainnya tidak terjadi politik uang. Misalnya antara dapil 1 dengan dapil lainnya. Menurut bapak apa yang menyebabkan hal seperti itu terjadi?	
N	:	Kalau masalah dapil sulit, hampir merata. Tapi kalau desa-desa boleh jadi ada, tapi ada juga yang tidak ada politik uang. Saya contohkan terus terang saja Lubuk Batang Lama itu Desa saya sendiri. Kamu boleh tanya sendiri ke sana. Tapi kalau desa-desa lain mungkin saja. Tapi kalau desa saya sendiri, terus	

		terang ini sebagai contoh, bisa tanya sendiri ke sana kenapa tidak ada politik uang di sana. Kalau saya yang menjelaskan tidak etis. Jadi tanyakan langsung dengan masyarakatnya.	
P	:	Apabila memang terjadi yang namanya politik uang, apakah ada dampak positif ataupun negatif dari politik uang terhadap masyarakat ataupun si calon tersebut?	
N	:	Sebenarnya ndak ada dampak positifnya, jadi politik uang itu ndak ada dampak positif sama sekali dilihat dari sudut apapun.	
P	:	Selama beberapa kali pemilu yang sudah dilaksanakan, biasa ada beberapa calon yang memberikan bantuan seperti untuk pembangunan masjid, jalan, sembako dan lain sebagainya. Menurut bapak, hal ini masuk dalam kategori suatu pemberian yang wajar atau sudah termasuk dalam politik uang?	
N	:	Tetap tidak bisa dibenarkan hal-hal seperti itu, kalau memang mau ada sumbangan, ada bantuan kenapa mau menjelang (berfikir) Sudah mau menjelang baik pilkada maupun pemilu.	
P	:	Menurut bapak, apakah setiap tindakan politik uang yang dilakukan oleh politisi akan mempengaruhi jumlah suara yang didapat?	
N	:	Kelihatan jelas. Mempengaruhi.	
P	:	Jika memang seperti itu, apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi perilaku politik uang karena hal ini jelas menimbulkan dampak yang tidak baik di pemerintahan juga di masyarakat?	
N	:	Hanya dua kalau menurut saya. Satu, aturan yang tegas. Jadi pelaksanaan dari aturan itu yang tegas. Jadi kalau memang aturan itu dilaksanakan dengan tegas saya kira kan ini akan mengikat perilaku dan tidak akan melakukan politik uang. Yang kedua, ekonomi masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu ekonomi sudah memadai, saya kira mereka nggak hirau lagi dengan uang dengan segala macam. Dan barangkali ya pendidikan, pendidikan yang memadai. Masa' umpamanya sarjana dan ekonomi sudah memungkinkan menerima uang 100 ribu dengan harapan untuk memilih kan nggak mungkin. Artinya apa, aturan, ekonomi dan pendidikan. Jadi tiga unsur ini. Kuncinya disitu. Nah sepanjang aturannya tidak dilaksanakan dengan tegas, kemudian ekonomi masyarakat masih memungkinkan tertipu oleh karena uang itu, kemudian pendidikan masyarakat tidak memadai artinya dia ndak ada rasa harga diri, ya jelas politik uang itu tidak akan terhapus.	
P	:	Kalau di Kab. OKU ini apalagi dipresentasikan, berapa persen perilaku politik uang ikut mempengaruhi proses pemilu di OKU?	
N	:	Yang kemaren ya, kalau saya melihat 80% politik uang	
P	:	Menurut Bapak, idealkah jika partai melakukan sosialisasi politik yang lebih baik ke masyarakat hingga kemudian masyarakat berani berkata tidak pada politik uang?	
N	:	Yang namanya partai itu kan bagus. Kalau partai. Tapi manusianya, manusianya. Kita contohkan, ndak ada mahar politik dalam aturan pilkada. Ndak ada kan? Dalam aturan pilkada itu ndak boleh ada mahar politik. ya tanya aja partai-partai yang ada walaupun bukan bersifat mahar, sumbangan itu sumbangan ini. tapi intinya kalau kita dengar-dengar barangkali lebih	

		<p>mahal dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi gimana seperti itu. Kalau partainya bagus, aturannya bagus. Tapi pelaksanaannya bagaimana, manusianya di dalam partai itu. Ndak ada, dalam aturan perubahan undang-undang pemilu itu nggak boleh kan, politik uang. Apa namanya ada mahar politik segala macam. Tapi kenyataannya pelaksanaannya. Saya dengar ndak ada, yang mengajukan tanpa penjanjian-perjanjian biaya, nggak ada. Satu partai pun ndak ada.</p>	
P	:	<p>Dari pengalaman bapak sendiri, apakah sistem rekrutmen calon itu mempengaruhi terjadinya politik uang oleh si calon ini nantinya?</p>	
N	:	<p>Ya karena, begini ya. Jadi partai ini menampilkan calon-calon yang menurut partai itu kan punya kemungkinan, punya kemampuan dia untuk duduk sebagai anggota legislatif. Nah punya kemampuan ini bukan hanya didukung oleh pengetahuan tapi didukung juga oleh materi. Karena semua partai mengharapkan kursi itu dapat. Oleh karena itu, dia mencari orang-orang yang dianggapnya mampu untuk mendapatkan kursi itu. Nah itu masalah. Karena partai juga, kan orang-orang dalam partai berfikir kalau saya tidak mengikuti seperti itu maka partai ini tidak akan ada kursi. Oleh karena itu, partai juga menampilkan, terjadi persaingan dari sisi materi tadi menampilkan orang-orang yang dianggap mampu dalam hal dibidang materi untuk bersaing dengan calon-calon dari partai yang lain. Balek kelingkaran setan, samo gilonyo dunio ini. karena terjadi persaingan tadi, money politik tadi. Kalau kita menampilkan orang-orang yang bersih yang ndak mau money politik, yo dak dapat kursilah. Akhirnya partai jadi ambruk, ancur tenggelam. Yang dapat partai yang calon-calonnya punya kemampuan.</p>	

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Eko Sungkono Patra

P : Pewawancara

N : Narasumber

TRANSKRIP		KET
P	: Apa tanggapan Bapak terkait dengan politik uang yang pada saat ini oleh sebagian orang dianggap menjadi suatu kewajaran?	
N	: Memang ada mas demikian bahwa, kita tidak memungkiri ya bukan hanya di Baturaja tapi di seluruh daerah. Money politik itu benar ada, saya pun merasakan. Dan inilah yang salah satu yang tidak disukai oleh PKS. Kenapa saya, apa namanya (berfikir) tidak begitu antusias, (berfikir) tidak begitu antusias kemudian ikut di (berfikir) apa namanya, Pemilu. Karena cost politiknya sangat tinggi. Sesungguhnya ini karena (berfikir) ada dua mata angin yang saling menguntungkanlah. Satu sisi mereka ingin mengambil keuntungan yang si calon. Kemudian masyarakat ingin mengambil keuntungan. Sama-sama klop lah. Simbiosis mutualisme. Saya merasakan begitu. Dan saya meyakini orang-orang yang duduk di DPR saat ini adalah orang yang keluar uang minimal 500 juta ke atas bahkan 1 milyar. Itu yang menjadikan cost politik sangat besar. Saya tahun 2009, saya untuk tantangannya saya habis 150 juta untuk beli kaos, untuk beli baju lengan panjang, baju koko itu 1000 harganya 70 ribu eh 70 juta plus cost dan sebagainya. Saya no money politik. Alhamdulillah dari situ suara saya paling lumayan tinggi ya. Eee seiring dengan itu, saya merasakan bahwa gaji yang kita terima di DPR itu 15 juta. Kalo di PKS itu ada infaqnya. Infaqnya sekitar 30% lah sekitar 4 jutaan. Dan orang lain itu menganggap bahwa anggota dewan itu hebat. Semua bisa dia lakukan. Orang mau menikahkan anaknya atau sunatan, mereka ke anggota dewan dan ini menjadikan cost yang lebih tinggi juga karena sudah dianggap mereka hebat tadi (tertawa) padahal tidak. Disitulah anggota dewan (berfikir) meminta proyek dan sebagainya. Main proyek itu sebenarnya nggak boleh, mungkin orang lain. Dan saya melihat setelah berjalannya waktu 5 tahun kita memang mendapat uang tetapi untuk kita kembali ke 150 juta itu susah, dan itu yang tidak dimengerti orang-orang atau calon-calon yang baru ini. nah saat ini kan banyak orang-orang kaya, orang-orang kaya dia tidak begitu berharaplah, dia terlalu memikirkan uang, yang penting dengan dia ada privilege, (berfikir) dia punya gengsi maka dia pengen jadi anggota dewan, dia ada gengsi, ada nama. Makanya dia nggak papa lah 1 milyar yang penting dia jadi anggota dewan. Seperti itu. Jadi bener-bener ada. Money politik itu ada.	
P	: Adakah aturan di PKS yang membatasi atau melarang kader-kader atau yang mencalonkan diri dalam melakukan money politic?	
N	: Ya ya kita nggak ada, kita kan partai dakwah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagai partai dakwah itu tidak khusus untuk mengurus kursi di DPR	

		tapi kita ngurusin di dakwah. gimana kita mau melakukan dakwah kalau uang yang digunakan tidak benar. Nanti setelah di DPR dia tidak akan ngurusin itu tadi. Tidak akan ngurusin rakyat. Dia akan memikirkan bagaimana caranya uang itu dibalikin. Saya aja yang 150 juta keluar, itu lama bisa baliknya. Apalagi yang keluarnya lebih dan itu bukan money politic ya. Itu koko politic. Politik dengan menggunakan baju koko. Tapi kalau, kan beda orang dengan kasih 100 ribu tiap orang. Balik ke PKS, kita tidak menyarankan untuk hal itu. Dan dengan hadiah seperti ini tadi (tertawa) ini kan termasuk juga ya (tertawa) baju kaos, baju koko itu termasuk juga tapi bukan dalam bentuk uang. Tapi dalam bentuk barang.	
P	:	Jika terjadi politik uang dalam pemilihan yang dilakukan oleh kader partai, adakah sanksi yang diberikan, dan bagaimana sanksi itu dijalankan?	
N	:	Kalau sanksi itu sampai sekarang belum ada	
P	:	Belum ada yang diatur secara tertulis sampai sekarang	
N	:	Ya Belum ada	
P	:	Menurut Bapak, solusi apa yang paling tepat untuk menghilangkan atau membatasi munculnya fenomena money politic pada pemilu-pemilu kedepan? Pemerintah kan nggak tegas ini, pemerintah itu nggak ada aturan yang jelas.	
N	:	Bahkan untuk pencalonan bupati ini, salah satunya boleh memberikan uang pada masyarakat, tapi 50 ribu Cuma. Diaturan yang baru kalau tidak salah baca. Ini yang—ketidakberesan undang-undang sesungguhnya, peraturan. Lah peraturan sendiri nggak tegas ya tidak pulih. Ini malah dikasih ini. jadi kalau saya baca dulu sih kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, calon bupati boleh memberikan uang tapi 50 ribu (tertawa). Kalau saya sih pinginnya untuk pemilu itu untuk memilih orang-orang yang bener-bener kredibel bukan dengan uang. Pilih yang mau kerja, berkualitas. Kalau yang mau duduk di lembaga dewan dia udah punya uang banyak, ya dia bawa jabatan itu sebagai pengisi saja, nggak begitu optimal.	
P	:	Jadi solusinya ketegasan dalam aturan?	
	:	Iya, makanya nggak jelas, nggak tegas	
N	:	Kalau saran untuk KPU sendiri sebagai penyelenggaran pemilu seperti apa pak? KPU kan menjalankan undang-undang. Sekarang calon ini dipermudah. Baliho, gambar itu KPU yang nyetakin. Gambar-gambar tadi setelah teng pemilu KPU yang pasang. Bahkan nanti, diundang-undang itu, boleh dibaca nanti. Boleh memberikan 50 ribu maksimal (tertawa). Ini kan nggak jelas. Kalau KPU kan sebagai penyelenggaran ini aja, apa namanya, penyelenggara pemilu. Asal mereka patuh hukum, on the track, jalan terus.	

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Iskandar Azis

P : Pewawancara

N : Narasumber

TRANSKRIP		KET
P	: Apa tanggapan bapak terkait dengan anggapan masyarakat bahwa money politic adalah suatu hal yang wajar?	
N	: Inilah yang menjadi tugas para (berfikir) ulama terutama ketika kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang wajar kan kita jadi sedih karena jelas-jelas hal ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam islam. Ya ini kan sama dengan sogok. Kasarnya kan nyogok ini. dan itu kan haram baik yang nyogok maupun yang disogok, ya kan. Di undang-undang pilkada kita pun demikian, dalam hukum pun tidak boleh. Jadi artinya money politic itu tidak ada dampak positifnya kan pak? Mmmm dampak positifnya itu sangat kecil sekali. Hanya satu orang. Ya kita misalnya ketika kita diberikan uang. Nah ini kan dampaknya sesaat. Tapi mudharatnya sangat besar. Dan ini yang tidak boleh dalam islam	
P	: Bagaimana tanggapan bapak bahwa menurut sebagian anggota legislatif, money politic juga merupakan motivasi pemilih, karena dianggap tidak serius dalam mencalonkan diri?	
N	: Di dalam menggapai suatu cita-cita dalam islam, memang kita butuh biaya. memang betul butuh biaya. biaya operasional. Butuh itu untuk ongkos, makan, ongkos jalan dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah berniat untuk membeli suara itu sudah menjadi suatu hal yang tidak benar. Makanya di negara kita ini selalu bermasalah. NKRI ini 90% islam tapi selalu bermasalah. Banyak pejabat yang bermasalah karena alasannya apapun yang terjadi harus bisa menjabat. Jadi masalah ini jadinya. Tapi kita MUI tidak bisa melakukan apa-apa, karena kewajiban kita hanya dakwah.	
P	: Menurut bapak, apakah politisi yang melakukan politik uang bisa dipastikan akan melakukan korupsi saat sudah menjabat?	
N	: Berdasarkan apa yang sudah dilihat sampai hari ini, itu terjadi. Sampai hari ini. makanya itu yang bapak sampaikan tadi, akan timbul masalah baru. Tapi kan kito tidak mengatakan siapa-siapa calon yang jadi itu kan. Gaji seorang bupati itu paling dak (berfikir) 50 jutaan lah katakanlah. Kalau dikalikan setahun baru sekitar 3 milyar. Nah ini kan sangat menjadi permasalahan. Oleh karena itu negara kito ni bermasalah terus. Dak sudah-sudah ini masalahnyo. Kadang ado beberapa calon yang ngasih, tapi idak bapak terimo. Dak galak. Apakah bapak sering mendapatkan tawaran dari beberapa calon pejabat politik, karena ini berkaitan bahwa tokoh agama adalah tohoh yang paling dipercaya masyarakat sehingga harapannya melalui tokoh agama, masyarakat akan mau mendengarkan untuk kemudian memilih si calon ini?	

		Ooo sering itu, kadang tidak berupa uang tapi barang kadangkala dan bantuan-bantuan lain. Ado jugo bapak disuruh berdakwah, tapi dalam porsi untuk dibayar.	
P	:	Apakah money politic mempunyai pengaruh dalam kemenangan seseorang?	
N	:	Ya berpengaruh lah. Pastinya berpengaruh. Mungkin pengaruhnya di kemungkinan menang tadi. Dan pengaruh ini mempunyai dampak. Karena dengan membayar diharapkan bisa menang. Dan mereka jugo meyakini bahwa dengan mereka membayar pasti menang. Selain itu, cumo berapa uwong dinegeri ini yang ndak duit dan ndak ngeluarke duit biar biso menang dalam pemilu. Nah itu justru masyarakat yang harus perlu di motivasi, dibimbing. Nah ini masyarakat malah di arahkan.	
P	:	Jadi, siapa yang lebih dulu harus disadarkan pak, calon atau masyarakat?	
N	:	Dua-duanya menurut saya. Haru dimulai dengan menyebut nama Allah mencalonkan. Jadi menang karena Allah. Kalah karena Allah. Selain itu perlu ado kesepakatan antar calon untuk tidak melakukan politic uang. Nah jadi persaingan mereka itu menjadi lebih sehat dan tidak politik uang dan masyarakat pun jadi tidak mengikuti pola politik uang dari calon.	
P	:	Lalu bagaimana dengan kebijakan partai pak dalam mengatasi politik uang ini pak. Kan mereka ini diusung oleh partai?	
N	:	Nah itu, harusnya ada lembaga independent atau lembaga apo mak itu. Kalau pemerintah kan sulit untuk mengkondisikan seperti itu. Harus ado itu, katokanlah lembaga independen, tapi dio berdasarkan undang-undang, berdasarkan hukum. Untuk memberikan motivasi pada calon untuk tidak melakukan politik uang. Dan ini harus dilakukan dan dikuti dengan sanksi. Ini harus jalan.	
P	:	Menurut Bapak bagaimana dengan peraturan yang terbaru yang melegalkan adanya politik uang?	
N	:	Ya, ada itu. Ada. Kalau tidak salah saya baca di media. Aturannya kalau menggunakan uang bolehnya 50 ribu, tapi kalau barang boleh lebih dari 50 ribu. Nah inikan nggak benar. Karena kita itu belajar dari kepemimpinan Rasulullah. Kepemimpinan kholifah. Padahal kholifah itu uangnya habis digunakan untuk menegakkan agama. Nah, duit abis ini bukan minta bukan. Nabi dan kholifah dalam menegakkan agama dan tanggung-tanggung. Dak kecil duitnyo tu. Dan itu mereka punya semua. Sepertinyo be miskin tapi sebenarnya kayo. Nah keikhlasan nabi dalam menyebarkan agama melalui tenaganya, usahanya, kekayaannya itu yang patut dicontoh dan diilhami. Sebagaimana Umar bin Khatab yang kisahnya sangat terkenal karena rela berjalan malam demi mencari keluarga miskin dan memberikan bantuan. Dan ini yang perlu dipelajari dari kepemimpinan para sahabat nabi tersebut.	
P	:	Menurut Bapak apakah mungkin money politic dalam pemilu itu dapat dihilangkan?	
N	:	Kalau mereka konsekuen dengan pancasila dan UUD 1945 akan hilang semua. Karena pancasila itu dibentuk oleh para pemimpin dan ulama. Yang dirancang oleh para tokoh dan negarawan serta ulama. Makanya pancasila itu, sila pertamanya Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah berserah pada ketuhanan maka semua sudah diatur oleh Tuhan, hakikatnyo dan kita pun	

	<p>menjalani. Nah duit tadi itu dibutuhkan dalam rangka untuk negara. Apapun bentuknyo. Itu dari sisi negara. Nah dari agama, undang-undangnyo yo al-qur'an dan hadist. Nah apolagi kito ni mayoritas islam. Dan undang-undang kito ni mengacu pada al-qur'an dan hadist ini sedikit banyak. Nah kalau sekarang ini kan hukum islam siubah-ubah. Yang benar jadi salah yang salah jadi benar. Yang menang pilkada menang biso dikalahkan, walaupun duoduonyo pake duit. Jadi panjang ceritonyo soal politik ini. maka itulah NKRI ini sulit, Sulit untuk kondusif. Mengentaskan kemiskinan itu menurut bapak tidak sulit, tapi kenapa sulit mengentaskan kemiskinan. Masih miskin terus. Rakyat kito Masih miskin. Karena pejabat itu tadi ya, dia tidak melihat apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai umat islam. Ketika seorang menjadi pemimpin ya nak ya, mulai dari kades, camat, Bupati, Gubernur sampai presiden harus mempunyai jiwa ulama. Ulama tidak harus jadi pemimpin. Tidak. Tapi ketika orang sudah dinobatkan menjadi pemimpin dia harus menjiwai ulama, seperti Rasul. Dengan begitu kita akan sejahtera. Kita kan pemimpin, tapi dak katek, menjiwai itu dak katek. Nah kalau itu terjadi, kalau ulama sudah naik mimbar, ulama bisa jadi imam sholat. Nah kalau pemimpin sudah naik mimbar, pemimpin bisa jadi imam sholat, insyaallah masalah di negeri ini akan mulai bagus. Mungkin idak ado pejabat kito mulai dari kades sampai presiden yang berani sampai naik mimbar untuk mengajak pada jalan yang benar itu dak katek. Tapi kalau pidato-pidato diacara-acara tapi dak katek yang berani naik mimbar. Dak katek yang berani jadi imam sholat. Mano ado. Suruhlah camat jadi imam sholat, dak pacak dio. Itu yang jadi masalah kan. Seharusnya setelah diangkat, dia harus jadi ulama, jadi panutan. Nah, sekarang ini yang lagi digenjarkan para ulama serta majelis ulama dalam rangka memilih pemimpin versi islam. Hati-hati itu. Sangat berkaitan dengan tauhid. Tidak mendeskreditkan perempuan. Dengan tidak mendeskreditkan perempuan. Tapi perempuan termasuk dalam islam. Islam sangat memuliakan perempuan. Islam sangat mengedepankan perempuan. Diluar negeri juga perempuan diutamakan, di islam juga lebih diutamakan.</p>	
<p>P N</p>	<p>: Di MUI sendiri tindakan apa yang sudah dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya politik uang dan sudah sejauh mana upaya tersebut dilakukan? : Kita, bapak ni, ini sudah periode kedua. 5 tahun kedua, tapi 5 tahun kedua ini baru tahun pertama. Jadi sudah 6 tahun. Pertama kali di MUI, bapak sangat tekankan, sangat memberikan motivasi kepada pengurus MUI agar menjiwai ulama. Walaupun bukan kiai tapi harus berlaku seperti ulama. Nah untuk meberantas politik uang ini, MUI dalam 5 tahun terakhir ini sudah memberikan motivas ke beberapa instansi seperti DPRD, kepolisian, nah itu berdakwah. Disamping itu jugo berdakwah di kecamatan-kecamatan. Apalagi sapani Ramadan ini jalan terus. Nah ini terus dilakukan walaupun hasilnya tetap diserahkan kepada masyarakat mau berubah atau tidak.</p>	

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Yopi Syahrudin

P : Pewawancara

N : Narasumber

		TRANSKRIP	KET
P	:	<p>Apa tanggapan bapak terkait dengan anggapan masyarakat bahwa money politic adalah suatu hal yang wajar?</p>	
N	:	<p>(tertawa) tentu memprihatinkan sesungguhnya. Namun pola demokrasi saat ini berjalan seperti itu. Tidak salah mengatakan bahwa memang banyak yang melakukan hal tersebut. Meskipun tidak semua orang dan tidak semata-mata karena uang. Dan yang kami alami saat ini tidak di semua daerah mengedepankan hal itu. Tapi lebih besar pada presentase kemurnian atau sesuai dengan hati nurani tadi. Apalagi dari sisi kekeluargaan, namun yang saudara katakan, kami tidak bisa elakkan dan itu memang terjadi di masyarakat. Kalau kitanya seperti itu, tentu memprihatinkan hal yang seperti itu. Berjalannya demokrasi ini bukan hanya di OKU tentu sangat memprihatinkan.</p>	
P	:	<p>Adakah pola-pola tertentu yang dilakukan oleh kandidat dalam mengemas bantuan politik di masyarakat?</p>	
N	:	<p>Artinya kalau bicara tentang kandidat kan tidak ... tapi kalau berdasarkan pengalaman, memang, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang uang bukan segalanya. Artinya, pemilihan legislatif kemaren memang pemilihan langsung. Masyarakat dihadapkan oleh person, individu calon itu sendiri. Nah disini masyarakat langsung merespon, langsung menilai. Ketika sang calon dapat meyakinkan, dapat dipercayai oleh pemilih. Inshaallah uang bukanlah ukuran terkait dengan permasalahan itu. Betul, sebab kami kemarin katakanlah memang incumbent seperti itu walaupun itu sebutan untuk kepala daerah. Nah, selama periode yang berjalan, periode pertama kan kita memperoleh penilaian dari masyarakat. apa kontribusi kami terhadap masyarakat itu dapat penilaian dari masyarakat. Tentu kalau kontribusi kita terlalu bagus kita tidak akan mendapat halangan. (berbicara dengan orang lain). Jadi pada intinya, politik tanpa bicara cost itu bohong. Namun kembali ke masyarakat. Tidak semua masyarakat seperti itu. Karena masih banyak masyarakat kita yang objektif dalam menghadapi pemilihan.</p>	
P	:	<p>Apakah terdapat kesamaan dari pola yang diinginkan oleh suatu daerah terkait dengan politik uang tersebut atau terdapat perbedaan pola-pola tersebut?</p>	
N	:	<p>Sebenarnya hampir sama. Di daerah satu dengan daerah lainnya dan sifatnya hampir sama. Namun terkait dengan tadi, meski terdapat kesamaan, tidak semua masyarakat didaerah itu yang seperti itu atau ada masyarakat tertentu yang memanfaatkan baik itu pemilu, pilkada maupun pilgub dan pilpres. Jadi memang tidak mungkin tidak ada. Namun sekali lagi kalau kita ini menilai secara objektif tidak ada yang tidak menghiraukan masalah politik uang.</p>	

<p>P :</p> <p>N :</p>	<p>ada beberapa kejadian yang kadangkala menyebabkan seseorang menyadari bahwa uang yang sudah dikeluarkan ternyata tidak mampu memberikan pengaruh pada dirinya. Ini merupakan kesalahan strategi personal atau bagaimana?</p> <p>(tertawa) jadi memang panjang ya. Jadi, mmm gimana ya? Bingung juga kan. Jadi gini, masyarakat juga seperti ini. Kadang kita dekati, kita kenal. Artinya kita sosialisasi juga penting. Pemilihan langsung, pengenalan calon sendiri lebih penting. Sangat penting pemilih itu mengetahui individu calon tersebut. Karena kita pemilihan langsung, kan gitu kan. Jadi dari sanolah kito biso ketahapan selanjutnya. Bahasa tak kenal maka tak sayang itu sangat penting dalam pemilihan umum.</p> <p>Jadi kalau orang yang memberikan uang dan memberikan nama sulit gitu ya?</p> <p>He eh, iya. Inikah pengalaman yang terjadi. Misalkan saudara memberikan 10 ribu tapi mereka tidak kenal, sementara saya juga memberikan 10 ribu dan mereka kenal saya maka akan tetep kembali kepada saya. Begitupun sebaliknya tapi masih ada lain hal yang mempengaruhi pilihan itu. Cuman saya mempercayai bahwa masyarakat tidak akan mungkin memilih calon yang tidak mereka kenal.</p>	
<p>P :</p> <p>N :</p>	<p>Kalau jumlah rata-rata uang yang dikeluarkan ikut mempengaruhi nggak pak?</p> <p>Jadi kalau rata-rata ini. ini sesungguhnya apa adanya, saya tidak mau memungkiri pengalaman, toh bukan bicara OKU tapi Indonesia. Tidak memungkiri bahwa besaran cost politik karena persoalan seperti itu. Namun meskipun ada hal seperti itu, ada sebagian masyarakat yang tetap objektif yang tidak mementingkan (berfikir) apa namanya politik uang tersebut. Politik uang juga kalau saya mengartikan kita memberikan uang pada saat pemilihan itu politik uang. Tapi politik uang itu berbeda dengan pembinaan. Menurut saya politik uang dan pembinaan itu berbeda. Kalau saya lebih mementingkan pembinaan. Dari awal saya, dari saya PAW sampai sekarang Alhamdulillah masih terus berjalan. Silaturahmi masih berjalan, Selama kontribusi kita berjalan. Jadi ini yang kita pegang untuk menghadapi pemilihan-pemilihan tersebut.</p> <p>Jadi strategi calon juga menentukan ya pak?</p> <p>Iya, jadi strategi masing-masing calon sangat mempengaruhi. Iyo. Kito orang desa kok, nggak susah. (tertawa) nggak susah kita silaturahmi ke masyarakat (tertawa) yang penting masih sering ngobrol sama mereka ya kan, sering makan bareng, sering ngopi bareng. Masih, insyaallah mereka masih ini sama kita.</p>	
<p>P :</p> <p>N :</p>	<p>Idealnya demokrasi kan tidak diciderai dengan politik uang, tapi sebagian mengatakan bahwa tanpa politik uang tentu tidak akan terpilih. Nah, ini merupaka satu-satunya alasan dalam melakukan politik uang atau masih ada lagi alasan lain hingga kemudian melakukan politik uang?</p> <p>Mungkin, sesuai dengan pemilu 2014 kemaren ada 7 desa yang saya kedepankan dalam hal pembinaan. Ini hanya semata melakukan pembinaan dengan desa-desa tersebut. Dan menurut saya ini bukan politik uang. Apabila ada orang yang sedang kesusahan dan kemudian saya bantu itu bukan lah politik uang.</p>	

		Dan pembinaan yang sudah diberikan ini tadi memberikan dampak yang dapat dirasakan sampai sekarang baik oleh masyarakat maupun oleh saya. Kalaupun terdapat kendala hal ini hanya pelaksanaan teknis saja. Tapi intinya pembinaan ini sangat berpengaruh.	
P	:	Dalam pandangan bapak, politik uang ini harus diapakan, apakah harus dirubah atau bagaimana?	
N	:	Jadi kalau bicara seperti itu kan luas bener, dan mungkin waktu kita tidak cukup. Ini juga tergantung dari tipikal masyarakatnya itu sendiri. Sesungguhnya calon jika ingin pemilihan itu bersih tapi takut masyarakat tidak bisa menerima hal itu, tapi kita terbentur dengan aturan pemilu tentang suara terbanyak. Nah ini kan menjadi masalah. Artinya masing-masing kandidat pun tetap bersaing. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita tidak sama dengan kawan kita akan ditinggal. Padahal orientasi kita ingin terpilih. Jadi yang namanya politik uang tadi sudah bisa dikatakan ikhtiar, yang ini yang payah. Sebenarnya bukan kita, tapi kondisi masyarakat yang menginginkan. Jadi susah untuk mencari yang hitam, calon atau masyarakat. Sama juga misalnya calon yang ini menggunakan, yang ini tidak, tapi nanti yang lain melakukan. Artinya kecurangan itu memang sudah melingkar. Memang aturan yang harus tegas. Selama pemilihan langsung maka permasalahan seperti ini masih terjadi. Sebenarnya nomor urut lebih bagus, seperti waktu itu.	
P	:	Adakah yang perlu diperbaiki dalam rekrutmen partai agar mampu menghindari politik uang?	
N	:	Sesungguhnya semua partai sama, nafasnya sama. Meskipun alirannya beda. Tapi kembali kepada permasalahan. Persaingan itu kan terus ya. Dan ini dilakukan. Kalau kita tetap menerjunkan kader yang tidak sesuai yang tidak dapat apa-apa. Sehingga melupakan proses-proses tadi. Nah ini yang menjadi masalah.	

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Zaplin Ipani

P : Pewawancara

N : Narasumber

		TRANSKRIP	KET
P	:	Apa tanggapan bapak terkait dengan anggapan masyarakat bahwa money politic adalah suatu hal yang wajar?	
N	:	Itu kalau anggapan wong lah cak itu, itu salah besar karena masih banyak masyarakat yang punya hati nurani dan tidak terprngaruh dengan politik uang. Jadi kalau berpikir, memang itu sebagian kecil yang hanya memikirkan materi. Jadi sebenarnya itu hanya penunjang, yang lebih efisien itu adalah gerakan kito untuk menjaring simpati masyarakat. Tapi itu tidak bisa menjadi tumpuan. Buktinyo kemarin yang banyak duit idak terpilih, kami yang biaso-biaso cak ini justru terpilih.	
P	:	Kadangkala kandidat ini salah dalam memberikan bantuan tersebut salah strategi sehingga justru mengalami kerugian, hal ini apakah polanya yang salah atau individu calon ini yang tidak dikenal?	
N	:	Ya kebanyakan itu, tidak berhasilnya itu karena calon ini tidak dikenal. Jadi pokok utama itu kita harus dikenal terlebih dahulu, materi hanya sebagai penunjang. Artinya harus tetap turun kebawah agar masyarakat kenal. Jadi kalau tidak dikenal masyarakat tidak akan berhasil.	
P	:	Apakah terdapat perbedaan karakteristik dalam masyarakat sehingga mempengaruhi pola politik uang?	
N	:	Iyo, perbedaan karakteristik sudah pasti ada. Kareno kalau untuk pileg, rato-rato wong yang nak pileg ini, wong yang baru nak di politik. Geraknyo kesini. Dating ke A ngasih, ke B ngasih. Akhirnyo yang nerimo bingung. Kemudian, dimano dio kenal, dimano dio dekat itu yang jadi pilihan terakhir. Kareno positif tumpah tindih. Kareno kalau dalam pileg itu ado 300 wong. Andaikan desa ini, ado 500 mato pilih yang nak nyalon 10 calon. Kalau yang wong-wong menginginkan itu, dak lebih dari 30% kondisi aku kemaren. Belum kondisi masyarakatnyo yang lah menengah kepucuk, ado ikatan keluarga dengan yang lain, belum yang golputnyo dan lain-lain. Cumo 30% na inilah yang diperebutkan. Misalnya aku ngenjuk sembako, ado yang lain jugo ngasih, akhirnyo yang deket samo dikenalnyo itu lah yang dipilih. Semuanya diterima, tapi satu pilihan terakhirnyo, yang dikenal.	
P	:	Artinya peluang untuk mendapatkan suara terbanyak karena dikenal tadi masih besar?	
		Masih besar	
N	:	Artinya politik uang tidak juga memperngaruhi?	
		Tidak juga	
P	:	Kemudian, tingkat keberhasilan melakukan politik uang ini bisa diketahui selama perjalanan atau setelah pentapan?	
N	:	Dalam perjalanan, karena masyarakat sudah tahu mau dimana arahnya.	

<p>P N</p>	<p>: Apakah money politik merupakan bentuk dari pencideraan etika politik? Iya, makanya di dapil saya itu menolak adanya politik uang, karena itu tidak baik. Menurut saya itu memberikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat. Tapi sebagai seorang politisi kadang-kadang saya terpengaruh dengan yang lain. Ini menyulitkan. Tapi pada intinya ini tidak boleh dilakukan.</p>	
<p>P N</p>	<p>: Apakah money politik merupakan bentuk pembodohan masyarakat? Iya pembodohan. Pembodohan di masyarakat. Jadi inilah yang menjadi pemikiran kedepan untuk mengatasi hal seperti ini. jadi pikiran masyarakat ni hanya sebagian kecil yang pokoknyo nak melok yang ado duitnyo. Tapi kdang hanya sebagian kecil. Ado jugo yang ngomong kalau endak suaronyo dibeli. Dan itu banyak jugo</p>	
<p>P N</p>	<p>: Kedepannya apakah sudah seharusnya money politic ini dikurangi dengan memperketat aturan atau seperti apa pak? Nah itu jadi pemikiran jugo. Malah tersirat dipikiranku untuk dibalekke kemodel dulu, nomor urut lagi. Kareno aku jingok masyarakat ini belum siap dengan banyak calon dalam pileg itu. Selain itu, kader-kader partai yang berpotensi tidak biso menduduki itu, sedangkan banyak partai punyo kader militan yang belum berpotensi untuk menduduki itu. Dengan suaro terbanyak ini akhirnya mereka kadang-kadang hanya mempunyai kemampuan di otak dan tenaga, di dana tidak. Akhirnya dak biso jadi. Walaupun dana bukan utuk money politik tapi biaya pergaulan kan cukup tinggi. Dari situlah timbul pemikiran untuk balik lagi ke nomor urut, tapi tetap menghilangkan KKN tentunyo. Cak saudara siapa dan anak siapa (tertawa). Itulah harapan satu-satunyo untuk menghilangkan politik uang tersebut.</p>	
<p>P N</p>	<p>: Kalau aturan bagaimana pak? Kalau bicara aturan lah saro, paling kebijakan. Itu pun terlalu susah jelaskannyo kareno kadang kebijakan itu tajam dibawah tumpul di atas.</p>	

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Hambali

P : Pewawancara

N : Narasumber

TRANSKRIP		KET
P	: Bagaimana tanggapan bapak tentang anggapan masyarakat yang menganggap politik uang atau jual beli suara adalah hal yang wajar?	
N	: Bagi orang yang beriman, sogok menyogok itu sudah jeas haram, baik itu yang menyogok maupun yang disogok maka akan berdosa. Yang namanya pileg, pibub maupun pilpres adalah proses yang disepakati oleh undang-undang jadi artinya untuk memilih sesuai dengan undang-undang di berikan seluas luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang amanah dan dari segi agamanya baik. Sedangkan dari KPU harus memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Disamping itu tugas dari tokoh-tokoh agama harus menyadarkan masyarakat di pengajian-pengajian atau mimbar-mimbar masjid. Menjalankan amanah itu hukumnya wajib bagi manusia. Maka dalam islam itu seseorang tidak boleh meminta jabatan tetapi kalau dimintai untuk memimpin atau diberi amanah maka harus dilakukan dengan bismillah.	
P	: Ada tidak dampak negatif dan positif dari politik uang tersebut?	
N	: Politik uang tersebut pasti berdampak negatif, karena suara rakyat sudah di beli dan artinya kalau sudah dibeli maka rakyat tidak punya hak lagi kalau dia sudah terpilih. Suaranya sudah dikontrak, secara nyata hal itu sudah melanggar hukum.	
P	: Apakah orang yang melakukan politik uang setelah terpilih nanti akan melakukan tindakan korupsi?	
N	: Saya rasa cukup dikalkulasi saja, berapa banyak uang yang dikeluarkannya untuk membeli pemilih ditambah dengan jumlah uang yang akan semakin besar karena adanya persaingan diantara mereka (peserta). Sebagaimana hukum ekonomi dimana biaya sedikit dikitnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, sedangkan uang yang dikeluarkannya tadi sudah banyak artinya dia akan mendapatkan untung yang tambah banyak lagi. Mereka itukan di gaji akan tetapi gaji itu tidak akan cukup untuk mengembalikan lagi modal awal mereka, sisanya yang mereka cari dengan jalan lain.	
P	Apakah politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu tersebut berpengaruh terhadap pilihan dari masyarakat itu sendiri?	
N	Karena banyak masyakat pemilih itu masih dalam keadaan ekonomi lemah, dalam islam sendiri keadaan ekonomi lemah itu menggoyahkan iman. Sehingga orang-orang yang lemah itu imannya goyah. Sedangkan	

		memakmurkan rakyat itu adalah perintah undang-undang, jadi kalau masyarakatnya masih lemah dan belum makmur ya wakil rakyat itu belum menjalankan undang-undang.	
P	:	Bapak sendiri sebagai tokoh agama dan masyarakat yang mempunyai hak pilih, apakah selama ini pernah diberi oleh calon berupa uang atau money politik dalam bentuk lainnya?	
N	:	Saya sudah pernah diantari langsung uang, tapi saya kembalikan. Dalam agama dosa besar bagi orang yang tau tapi tidak melaksanakan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi yang menerima sogok juga berdosa. Tetapi masih banyak yang tidak menerima, karena tergantung pada keadaan ekonomi tadi artinya kefakiran dan kemiskinan itu mudah tergoyahkan keimanan seseorang.	
P	:	Menurut bapak, cara terbaik untuk menghentikan money politik ini seperti apa pak?	
N	:	Sejahterakan rakyat. Karena rakyat sekarang ini masih miskin dan belum sejahtera. Contohnya pendidikan, rumah sakit, infrastruktur jalan semuanya itu masih tidak memuaskan masyarakat, pelayanannya tidak baik, jalan masih banyak rusak, pasar tidak rapi, kesempatan kerja susah. Bagaimana mau meningkatkan ekonominya kalau kesempatan kerja saja tidak ada. Itulah cara-cara mengukkur kesejahteraan rakyat. Padahal untuk mewujudkan hal ini mudah, uang negara banyak. Pegawai-pegawai itu di gaji, mengapa mereka tidak mensejahterakan rakyat? Hal itu karena mereka tidak amanah.	

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Hendri Wijaya

P : Pewawancara

N : Narasumber

TRANSKRIP		KET
P	: Banyak masyarakat menganggap bahwa money politik adalah sesuatu hal yang wajar, seperti apa tanggapan bapak mengenai hal tersebut?	
N	: Iya memang pada kenyataannya seperti itu sekarang ini, politik uang itu sudah dijadikan salah satu ikhtiar bagi kandidat. Sulit untuk mendapatkan suara kalau tidak dengan cara yang demikian. Tetapi hal itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baik untuk dilaksanakan, seperti yang saudara katakan tadi, hal itu adalah pelemahan dalam demokrasi, walaupun sebenarnya demokrasi itu sendiri sulit untuk tidak diwarnai oleh money politik itu.	
P	: Menurut tanggapan bapak, apakah orang yang melakukan money politik itu akan melakukan korupsi nanti setelah terpilih?	
N	: Kalau menurut saya tidak juga demikian, karena orang yang sudah mau terjun berkompetisi untuk mencalonkan diri itu, sudah memiliki pemikiran yang matang. Mereka memang sudah siap untuk mengeluarkan uang demi memimpin dan mengabdikan kepada masyarakat. Tetapi sebagian juga masih ada yang hitung-hitungannya untuk mengembalikan modal nantinya. Saya yakin masih banyak kok yang memang benar-benar baik untuk memimpin.	
P	: Ada tidak dampak negatif dan positif dari politik uang tersebut?	
N	: Dampak negatifnya banyak, salah satunya adalah tadi yang anda bilang akan menyebabkan orang korupsi itu. Tetapi dampak positifnya juga ada, yaitu dengan money politik itu dapat menyebabkan tingkat partisipasi pemilih meningkat. Coba kita liat kalau pemilihan presiden dan gubernur banyak angka gulput atau tidak memilih. Sedangkan pemilihan legislatif dan bupati sedikit angka golputnya, artinya dapat kita simpulkan yang menjadi motivasi pemilih itu adalah uang yang dalam hal ini adalah money politik itu.	
P	: Apakah selama beberapa kali pemilu ini bapak sudah pernah dikasih sumbangan yang mengarah kepada politik uang. Dan bagaimana sikap bapak?	
N	: Sering saya dikasih uang oleh calon, tapi ya tidak saya terima. Karena kalau saya memilih itu ya berdasarkan apakah saya sudah kenal apa belum dengan calon tersebut, saya tidak mau kalau saya tidak kenal. Biasanya kalau kita sudah kenal itu kan kita dekat tu, jadi ya kedekatan emosional menjadi yang paling dominan dalam menentukan pilihan saya. Kalau kita sudah dekat maka seharusnya kita yang memberi sumbangan dengan calon tersebut, itu kalau	

		kita sudah dekat sekali atau mungkin masih ada hubungan keluarga. Tidak mungkin kita yang mereka beri, seharusnya kita yang membantu mereka.	
P	:	Apakah politik uang tersebut berpengaruh terhadap pilihan seseorang dan mempengaruhi juga jumlah suaranya?	
N	:	Dikatakan berpengaruh ya pengaruh tapi tidak juga besar karena pada dasarnya seluruh calon itu kan memberi uang semua kepada pemilih, jadi pertimbangan pemilih itu adalah kenal atau tidaknya tadi kepada calon tersebut. Uangnya mereka ambil tapi pertimbangan selanjutnya adalah kenal atau tidak dengan calon tersebut, untuk apa memilih orang yang tidak kita kenal. Tetapi memang ada sebagian yang memilih jumlah uang yang lebih besar memberinya.	
P	:	Menurut bapak apa solusi terbaik untuk menghilangkan politik uang tersebut?	
N	:	Harus ada komitmen bahkan hitam diatas putih antara setiap calon yang akan berkompetisi untuk masing-masing tidak melakukan politik uang tersebut. Mereka itu saling kompetisi artinya saling mengawasi, maka mereka yang akan tahu siapa yang melakukan money politik atau tidak. Jadi dengan adanya perjanjian diantara mereka, maka siapa yang melakukan politik uang harus dilaporkan oleh seluruh calon yang lain. Kalau tidak dengan cara ini maka tidak akan berhasil mengatasi politik uang tersebut.	